

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



OLEH:

WIWIT SYAHDA HARTINA

NPM: 187110122

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU 2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wiwit Syahda Hartina
NPM : 187110122
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua


Lilis Surjani, S.Sos., M.Si

Pembimbing


Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

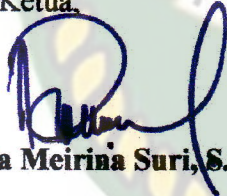
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wiwit Syahda Hartina
NPM : 187110122
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

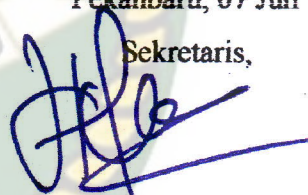
Pekanbaru, 07 Juli 2022

Ketua,



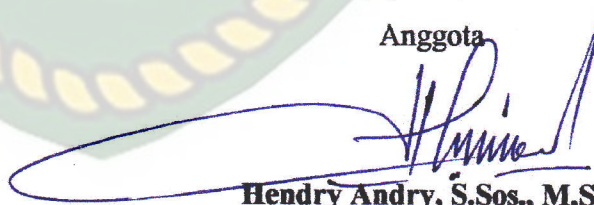
Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si

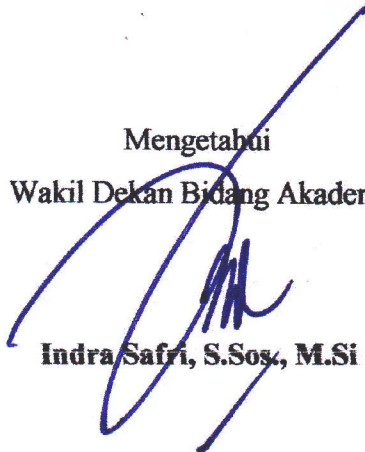
Anggota



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0577/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Wiwit Syahda Hartina
N P M : 187110122
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Struktur Tim :

1. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Hendry Andry, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Juli 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

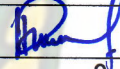

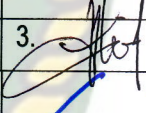

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0577/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 06 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Juli 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Wiwit Syahda Hartina
NPM : 187110122
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Nilai Ujian : Angka : " 84 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Juli 2022
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

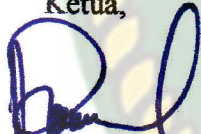
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wiwit Syahda Hartina
NPM : 187110122
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai
Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawa

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

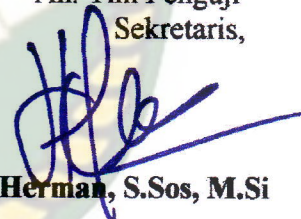
Pekanbaru, 07 Juli 2022

Ketua,



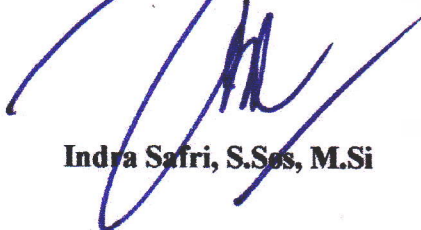
Dr. Dia Meirina Sufi, S.Sos, M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Herman, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunia Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan petunjuk kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Penulis menyadari penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si Sebagai pembimbing saya yang luar biasa yang telah banyak membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepada Keluarga yang paling istimewa Kedua Orang Tua Tercinta Uba saya H. Bojang & Umak saya Hj. Sirai dan Ilung saya Nuriyah, Kakak saya Herlinda, abang ipar saya Junaidi & Darwis, kepada ketiga keponakan saya Gusri Nur, Heta Junenti Ramadhani & Arumi Nacira Anandayu yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dan dukungan baik secara moril dan materi serta menjadi suport system terbaik kepada saya sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada diri saya sendiri Wiwit Syahda Hartina, S.AP yang sudah mampu berjuang dan bertahan dalam menghadapi semua rintangan, cobaan, badai kehidupan yang lika liku baik dalam percintaan, pertemanan, drama perskripsian yang sudah terlewatkan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Bapak Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah mau melakukan wawancara dan memberikan informasi mengenai BLT untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibuk kantor Camat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan data untuk penelitian ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu kantor Desa Terantangmanuk di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan informasi untuk melengkapi penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mencari ilmu di Universitas Islam Riau.

11. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya di dalam administrasi.
12. Kepada Bapak dan Ibu masyarakat pelaku UMKM atau yang menerima BLT yang sudah memberikan informasi untuk penelitian ini.
13. Kepada Sahabat-sahabat tersayang Ravika Indrayana, Wihartian, Daini, Reni Susilawati, Mayka Lesmawati, Yunita Nur Fitriana, Widya Asnah, Raharjo, Zulfan yang menjadi suport system terbaik dalam penulisan Skripsi ini.
14. Kepada Sahabat-sahabat terbaik di semester akhir Sulistya Nigsih, Ria Andryani, Sepni Nasar Wintian, Indah Irawati, Ikbal Khair yang selalu ada dan menjadi suport system terbaik selama Skripsian yang memberi motivasi dan menjadi tempat curhat terhadap lika liku kehidupan serta teman-teman Administrasi kelas A yang sudah ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
15. Kepada Orang Spesial yang sudah bertahan selama 5 tahun terakhir ini Aris Wardiman yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi tempat untuk bercerita dalam penulisan skripsi hingga saat ini.

Naskah skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari pembaca.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Penulis

WIWIT SYAHDA HARTINA

NPM: 187110122

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Administrasi	13
2. Konsep Organisasi	16
3. Konsep Manajemen	18

4. Konsep Kebijakan Publik.....	19
5. Konsep Implementasi Kebijakan	24
6. Konsep Efektivitas	30
7. Konsep Program Kebijakan	33
8. Konsep UMKM	34
B. Kerangka Pikir	37
C. Konsep Operasional	38
D. Operasional Variabel	41
BAB III: METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan Dan Keyinforman	43
D. Jenis Dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Jadwal Hasil Penelitian	47
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	48
A. Terbentuknya Kabupaten Pelalawan	48
B. Luas Wilayah Dan Kependudukan	48
C. Kecamatan Pangkalan Kuras	51
D. Sejarah Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM	53
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas Key Informan dan Informan.....	56

1. Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
2. Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur	57
3. Key Informan Dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	58
B. Hasil Dan Pembahasan Dari Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan kurus Kabupaten Pelalawan	58
1. Pemahaman Program	60
2. Tepat Sasaran	79
3. Tepat Waktu	95
4. Tercapainya Tujuan	110
5. Perubahan Nyata	125
BAB VI: PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman:

Tabel I.1	:Jenis Usaha yang memiliki badan izin berusaha bagi Pelaku UMKMK Keseluruhan Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	9
Tabel II.2	:Operasional Variabel Penelitian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	41
Tabel III.1	:Informan dan Key Informan	44
Tabel III.2	: Jadwal Hasil Penelitian	47
Tabel IV.1	: Daftar Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan	50
Tabel IV.2	: Daftar Penduduk Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	52
Tabel V.1	: <i>Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.</i>	56
Tabel V.2	: <i>Key Informan Dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur</i>	57
Tabel V. 3	: <i>Key Informan Dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin</i>	58

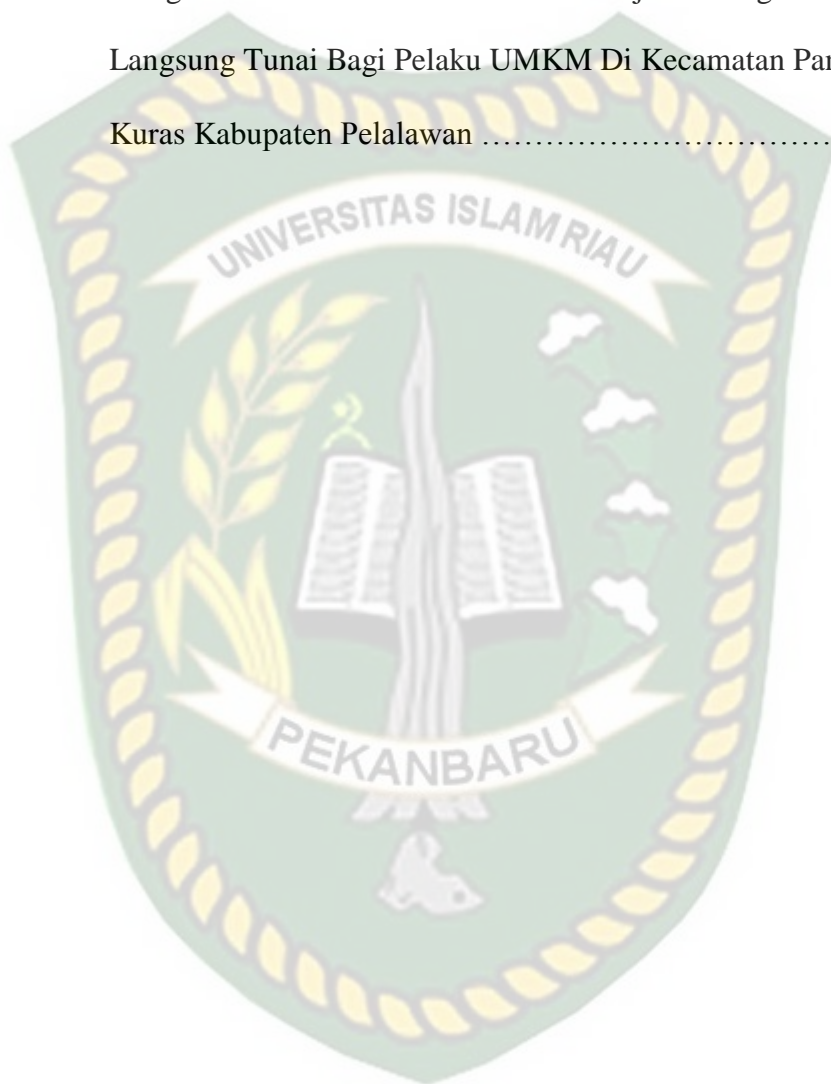
DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman:

Gambar I.1 : Kerangka Pikir Penelitian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan

Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

- Lampiran 1 : Dokumentasi foto penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 153
- Lampiran 2 : Lampiran daftar wawancara tentang Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 160
- Lampiran 3 : Lampiran surat keputusan pembimbing dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 164
- Lampiran 4 : Lampiran surat rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Pimpinan Bank BRI 165
- Lampiran 5 : Lampiran surat rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 166
- Lampiran 6 : Lampiran surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru 167
- Lampiran 7 : Lampiran surat rekomendasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 168
- Lampiran 8 : Lampiran surat keterangan melaksanakan penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kuras 169

Lampiran 9 : Lampiran surat keterangan jurnal online mahasiswa dari Universitas
Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 170

Lampiran 10 : Lampiran surat keterangan lulus plagiasi Skripri dari Universitas
Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 171

Lampiran 11 : Lampiran Sertifikat Bimbingan Baca Al-Qur'an 172



SURAT PERNYATAAN

N a m a : Wiwit Syahda Hartina
NPM : 187110122
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai
Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Yang Menyatakan,



WIWIT SYAHDA HARTINA

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

WIWIT SYAHDA HARTINA

Efektivitas adalah pengukuran dengan artian tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Penerapan makna efektivitas untuk organisasi berarti tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan yang telah diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penulis mengacu pada teori Sutrisno (2007:125-126) dengan indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan dalam teknik analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dikategorikan Kurang Efektif, karena masih banyak masyarakat yang mendapatkan BLT UMKM tetapi tidak memiliki usaha dan terdapat masyarakat yang tidak mendaftarkan diri secara online justru mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang disalurkan oleh pihak Pemerintah pada masa pandemi. Saran yang diberikan adalah agar Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara efektif lagi agar tujuan dan sasaran dari program BLT ini memang sesuai dan tepat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan Program BLT dan UMKM

**POLICY EFFECTIVENESS OF CASH DIRECT ASSISTANCE PROGRAM
FOR MSME ACTIVITIES IN THE PANDEMIC TIME IN PANGKALAN
KURAS DISTRICT, PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

WIWIT SYAHDA HARTINA

Effectiveness is a measurement in terms of the level of achievement of predetermined goals or objectives. Effectiveness will become clearer if it has direction and goals to achieve something that is expected. The application of the meaning of effectiveness to the organization means the achievement of organizational goals in accordance with those that have been implemented through the activities that have been carried out. This study aims to see how the level of Effectiveness of Cash Direct Assistance Program Policies for MSME Actors during the Pandemic Period in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The author refers to the theory of Sutrisno (2007:125-126) with the assessment indicators used include Program Understanding, Right on Target, Right on Time, Achievement of Goals, Real Change. This type of research is using a qualitative method that produces descriptive data. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation, while in data analysis techniques researchers used descriptive analysis. The results of the study on the Effectiveness of Cash Direct Assistance Program Policies for MSME actors in the Pandemic Period in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency are categorized as Less Effective, because there are still many people who get MSME BLT but do not have a business and there are people who do not register online instead get BLT for MSME actors in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, which were distributed by the Government during the pandemic. The advice given is that the Government should carry out effective supervision again so that the goals and objectives of the BLT program are in accordance with the predetermined targets.

Keywords: Effectiveness, Program Policy Cash Direct Assistance, and Micro Small Medium Enterprises

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Kesejahteraan adalah salah satu tujuan yang tidak bisa terlepas bagi pemerintahan Indonesia, pemerintah selalu melakukan banyak hal untuk mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia melakukan segala cara agar masyarakat merasa sejahtera dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap bisa merubah baik pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti dua tahun terakhir ini, pemerintahan membuat kebijakan dalam berbagai bentuk kebijakan terutama dalam bidang ekonomi.

Perekonomian Negara Indonesia pada saat ini sedang tidak stabil, ketidak stabilan itu muncul dari permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu munculnya sebuah virus yang bernama CoronaVirus Diseases-2019 (Covid-19). CoronaVirus Diseases-2019 yaitu merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Ini termasuk jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang sangat luar biasa yang awal mula terjadi di Wuhan China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-COV2) yang menyebabkan penyakit CoronaVirus Diseases-2019

(Covid19). Dimana termasuk salah satu virus yang menular yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan pada kondisi sosial dan ekonomi.

Pandemi Covid-19 sangat meresahkan bagi warga Negara atau masyarakat luas yang tidak kunjung terselesaikan, terutama di sektor usaha dan pekerja, menyebabkan terjadinya kehilangan lapangan pekerjaan dan angka pengangguran terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan dan pencegahan penularan Covid-19, dari mulai diterapkannya aturan bekerja di rumah, pembelajar jarak jauh (PJJ) bagi siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang oleh pemerintah, justru membuat masyarakat beranggapan bahwa kebijakan dilakukan pemerintah kurang memuaskan bagi mereka.

Masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Dan Mengah (UMKM) di Indonesia maupun di Daerah-Daerah mengalami keterpurukan perekonomian, dimana kurangnya permintaan, pemasaran, serta sulitnya mendapatkan bahan baku yang diperlukan sehingga modal yang digunakan untuk melanjutkan usaha berkurang atau tidak stabil seperti sebelumnya. Untuk membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan selama pada masa Pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program ini diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM agar tetap bisa menjalankan usahanya di masa pandemi Covid-19 serta salah satu bentuk dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kebijakan menurut James Anderson (Mustari, 2015) Mengatakan secara umum bahwa istilah kebijakan atau policy digunakan untuk melihat suatu perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu lembaga pemerintah dalam suatu kegiatan dibidang tertentu.

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar suatu rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam mencapai suatu rencana yang telah ditentukan.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah yang mengarah kepada suatu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan baik di masyarakat maupun di pemerintahan yang terkait.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program BLT bagi pelaku UMKM merupakan suatu kebijakan yang membantu pelaku usaha dalam penambahan modal serta meningkatkan keuangan dalam usaha. Tujuan dari kebijakan ini untuk membantu masyarakat terutama bagi pelaku badan yang memiliki usaha dan memperbaiki perekonomian yang sedang memburuk dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan salah satu bentuk program yang dibuat oleh pemerintah diberikan kepada masyarakat yang perekonomiannya rendah , Kebijakan Program BLT merupakan ide wakil Presiden yaitu Jusuf Kallah bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memenangkan pemilu di tahun 2004, serta sebagai instruksi presiden nomor 3 tahun 2008. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program BLT untuk masyarakat

yang terdampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terutama bagi pelaku UMKM.

Bantuan bagi pelaku UMKM (BPUM) diatur dalam peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan mendukung pemulihan ekonomi. Pasal 1 ayat 2 peraturan menteri koperasi dan UKM menyebutkan bahwa BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara.

Beberapa bentuk program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program bekerja cermat, transparan, dan hati-hati.
2. Program mudah diakses pelaku usaha mikro.
3. Pelaku usaha mikro mendaftar hanya melengkapi data.
4. BPK lakukan pemeriksaan untuk pastikan penyaluran banpres tepat sasaran.
5. Proses pemeriksaan data dikawal oleh BPKP.

Suatu program yang dibuat oleh pemerintah tentu memiliki tujuan, tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM sendiri terdiri dari:

1. Untuk mendukung pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka meghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam rangka program PEN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.

UMKM menurut Handini (2019: 19) adalah suatu bentuk usaha yang dibuat atas inisiatif atau kemauan sendiri masyarakat. Masyarakat sebagian besar beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan bagi pihak yang memiliki UMKM saja, sebenarnya adanya UMKM tentu akan mengurangi angka pengangguran di Negara Indonesia.

Dari penjelasan di atas UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang atas dasar keinginan atau inisiatif diri sendiri tanpa unsur paksaan atau terlibat kerja sama dengan pihak lain, serta bentuk usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan.

Setiap warga Negara Indonesia baik di Provinsi, Kabupaten yang memiliki UMKM ada peluang besar untuk mendapatkan BLT UMKM di masa pandemi Covid-19. Dimana warga negara atau masyarakat harus memenuhi kriteria dan persyaratan tentang mendapatkan dana BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 2 menjelaskan BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka program PEN , Pasal 3 ayat 1: BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000, 00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pemerintah merencanakan bahwa BLT UMKM tahun ini di salurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Masing-masing penerima BLT UMKM akan mendapat bantuan dana sebesar Rp. 1,2 juta, pendapatan BLT UMKM tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,4 juta.

Dalam penerimaan BPUM bagi pelaku UMKM harus memenuhi persyaratan-persyaratan dimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 5 persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerimaan BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Tata cara penyaluran BPUM meliputi:

- a. Pengusul calon penerima
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima
- c. Penetapan penerima

- d. Pencairan dana BPUM; dan
- e. Laporan penyaluran.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mecantumkan beberapa Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai penerima bantuan UMKM/BPUM Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi pelaku usaha MIKRO produksi/jasa di wilayah Kabupaten Pelalawan.
2. Usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
3. Memiliki NIB & IUMK sesuai dengan nama pemohon pendaftar.
4. Tidak sedang memiliki hutang di perbankan dan lembaga pembiayaan apapun.
5. Jika memiliki rekening tabungan aktif di bank, saldo maksimal tidak lebih dari Rp. 2 juta dan sesuai dengan nama pemohon.
6. Pemohon tidak sebagai pegawai atau anggota PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD.

Selain memenuhi syarat di atas untuk mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM, maka masyarakat yang memiliki UMKM di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kuras harus mendaftar secara online dalam program BLT, dimana harus mengunjungi link yang berkaitan untuk mendaftar yaitu dengan mengklik <https://mataumkm.riau.go.id>. Setelah membuka link, maka bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan diri akan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ada salah satunya biodata diri yang harus dilengkapi sesuai ketentuan dari kebijakan pemerintah atau lebih jelas sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM dapat mendaftarkan diri melalui Hp Android atau Laptop, yang terkoneksi dengan internet.
2. Kunjungi link form pendaftaran BPUM online resmi Kabupaten Pelalawan di <https://mataumkm.riau.go.id>.
3. Maka setelah itu akan ditampilkan formulir yang akan diisi untuk melengkapi data diri.
4. Halaman depan formulir akan terlihat jelas data yang akan diisi dan ikuti perintah yang ada di formulir, seperti isi identitas diri mulai dari Nama, Nomor KTP/KK, Nama Pelaku Usaha dan sebagainya yang berkaitan dengan data pribadi.
5. Setelah formulir terisi, sebaiknya periksa kembali data-data yang telah diinput pastikan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi data, agar bisa di proses oleh dinas yang terkait.

Setelah proses pendaftaran selesai para pelaku UMKM dapat melakukan pengecekan apakah termasuk penerima BPUM atau tidak dengan cara yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengakses <https://eform.bri.co.isd/bpum>.
2. Isi nomor KTP pada kolom yang tersedia.
3. Pelaku UMKM dapat masukkan kode verifikasi yang sudah tertera di sebuah kolom di halaman yang terkait.
4. Lalu klik proses inquiry yang ada di layar Hp.
5. Setelah itu ada pemberitahuan apakah termasuk penerima BPUMP 2021 atau tidak terdaftar sebagai penerima.

Dengan melakukan berbagai tahapan atau cara-cara di atas, sangat besar kemungkinan peluang bagi para pelaku UMKM mendapatkan BLT yang telah dibuat dalam kebijakan pemerintah, untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat terutama yang memiliki bidang usaha atau pelaku UMKM.

Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, syaratnya harus memiliki surat perizinan berusaha sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 37.

Pelaku UMKM harus memiliki surat izin sebagai badan usaha agar bisa mendapatkan BLT atau salah satu syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM dari kebijakan program pemerintahan, sama halnya dengan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ada beberapa yang sudah terdata dan mendapatkan surat izin dalam usaha. Ada beberapa jenis badan usaha UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Jenis Usaha yang memiliki badan izin berusaha bagi UMKM keseluruhan di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Industri pengolahan	29
2.	Jasa lain-lainnya	35
3.	Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan	20
4.	Perdagangan dan restoran	257
5.	Listrik, gas, dan air bersih	6
6.	Perdagangan	6
7.	Pengangkutan dan komunikasi	2
8.	Konstruksi & perdagangan dan restoran	7
9.	Pertambangan dan pengalihan	1
Jumlah		363

Modifikasi penulis 2022

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa jenis usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan memiliki 9 (Sembilan) jenis usaha, yaitu Industri Pengelolaan berjumlah 29, Jasa Lain-Lainnya berjumlah 35, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan berjumlah 20, Perdagangan Dan Restoran berjumlah 257. Listrik, Gas, Dan Air Bersih berjumlah 6, Perdagangan berjumlah 6, Pengangkutan Dan Komunikasi berjumlah 2, Konstruksi & Perdagangan Dan Restoran berjumlah 7, serta Pertambangan Dan Pengalihan berjumlah 1. Total keseluruhan jenis usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras ada 9 dan jumlah keseluruhan yang terdaftar sebagai pelaku UMKM yang telah dikeluarkan surat izin berusaha berjumlah 363 badan usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pelaku UMKM yang sudah memiliki surat izin badan usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tidak semuanya mendapatkan BLT, dari jumlah keseluruhan yang terdata di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan peneliti mengambil 2% dari jumlah keseluruhan yaitu 5 orang yang memiliki badan izin berusaha, dari 5 orang pelaku UMKM peneliti hanya menemukan 1 orang yang memiliki badan usaha yang menerima BLT di tahap kedua di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Peneliti menemukan beberapa pelaku UMKM yang tidak terdata yang memiliki surat izin berusaha di Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan mendapatkan BLT, pelaku UMKM tidak mendaftarkan diri secara online tetapi mendapatkan BLT sehingga program BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi termasuk suatu program yang tidak

jelas dengan kata lain program abal-abal yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Terdapat pelaku UMKM tidak mendaftarkan diri karena tidak tahu cara mengakses/mendaftar secara online.
2. Pelaku UMKM sudah mendaftarkan diri tetapi tidak ada pemberitahuan bahwa menerima BLT UMKM.
3. Pelaku UMKM tidak mendaftarkan diri tetapi menerima BLT UMKM. Serta pelaku yang mendapatkan/ menerima BLT justru tidak terdaftar yang memiliki surat izin usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai UMKM.
4. Terdapat masyarakat yang tidak memiliki badan usaha justru mendapatkan BLT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti dapat mengangkat permasalahan penelitian mengenai “Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan pengetahuan khususnya di bidang ilmu administrasi.

- b. Secara Akademis

Secara Akademis, penelitian ini juga diharapkan sebagai salah satu rujukan yang akan melakukan kasus yang sama untuk diteliti dan lebih mendalam.

- c. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM di masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial, yang defenisinya tidak hanya terbatas pada kegiatan ketatausahaan. Administrasi terbagi atas dua pengertian yaitu administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses aktifitas kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan adminstasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor, kode surat, pengetikan, pegandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi.

Menurut Atmosudirdjo dalam (Zulkifli & Yogia, 2014) merumuskan ragam pengertian untuk menerapkan lingkup konsep administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 1 Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung.
- 2 Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan status yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaanya

(*financial resource*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.

- 3 Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggungjawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
- 4 Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- 5 Administrator menaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab melalui apa yang disebut administrasi.

Konsep administrasi menurut Atmosudirjo, 2003 dalam (Zulkifli & Yogya, 2014) yaitu sebagai berikut:

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah *administrator* yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
4. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan *badan pimpinan* dari pada suatu organisasi.
5. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
7. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial tertentu (*administrative behaviour or administration as spesial type of social behaviour*) yang memerlukan sikapndan mental tertentu serta

merupakan tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behaviour*).

8. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*Skill*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
10. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resource*) dimaksud meliputi, orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara-teknik (*methods-technology*), ruang (*space*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggungjawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemiik organisasi.

Menurut (Siagian, Filsafat Administrasi, 2003) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan mengenai administrasi diatas dapat dilihat pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian yang sama yaitu:

- a. Kerja sama
- b. Banyak orang, dan
- c. Untuk mencapai tujuan bersama.

Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pembagian tugas-tugas dan concensus serta dilakukan dengan rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sekelompok orang tersebut. Administrasi adalah sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan

fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern sebagai kegiatan-kegiatan para masyarakatnya dilangsungkan dalam organisasi modern. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat hubungannya dengan organisasi.

2. Konsep Organisasi

Menurut Siagian dalam (Andry & Yussa, 2020) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat, dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang dimiliki pola atau urutan-urutan yang dilakukan secara relatif teratur dan berulang-ulang.

Menurut (Zulkifli & Yogya, 2014) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersans dan secara formal terikat dalam rangka pencapain sutu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Anthony dalam (Priyono, 2017) organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, dimana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Artinya tujuan organisasi dapat

dicapai melalui badan atau manajemen yang dilakukan terhadap sejumlah orang sebagai pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan organisasi.

Organisasi menurut Koontz dan O'Donnel dalam (Hasibuan, 2015) adalah pembina hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun secara horizontal diantara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, organisasi adalah hubungan struktural yang menikat dan menyatukan perusahaan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi.

Menurut Anthony organisasi dalam (Priyono, 2017) merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, dimana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Artinya tujuan organisasi dapat dicapai melalui tatanan atau manajemen yang dilakukan terhadap sejumlah orang sebagai pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan organisasi.

Menurut Allen dalam (Hamim, 2005) organisasi adalah suatu proses idrntifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefenisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggungjawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud orang bekerja sama secara efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Siagian, 2003) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang

terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu:

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
2. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut (Zulkifli & Yogia, 2014) organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerja sama sejumlah personil, dan juga mencakup rangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukkan staf, pendelegasian wewenang, serta tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah atau tempat bekerja sama antara dua orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu organisasi.

3. Konsep Manajemen

Menurut (Hasibuan, 2015) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Terry dalam (Zulkifli & Yogia, 2014) fungsi-fungsi manajemen terbagai menjadi empat (4) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan).
2. *Organizing* (Organisasi).
3. *Actuating* (Pemberian dorongan), dan
4. *Controlling* (Pengawasan).

Menurut G. R. Terry dalam (Hasibuan, 2015) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dari pengertian manajemen diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan potensi orang lain melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai satu tujuan secara efektif dan efisien.

4. Konsep Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut James Anderson (Mustari, 2015) Mengatakan secara umum bahwa istilah kebijakan atau policy digunakan untuk melihat suatu perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu lembaga pemerintah dalam suatu kegiatan dibidang tertentu.

Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab, 2012) kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah di dalam lingkungan tertentu dengan

hambatan tertentu untuk mencari peluang untuk mencapai tujuan serta mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut (Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau bada pemerintah di dalam suatu bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di lingkungan publik, dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku didalamnya.

Menurut (Mustari, 2015) Kebijakan publik merupakan bentuk ... pemerintah menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kebijakan publik terkadang menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Menurut (Islamy, 2018) secara sederhana bahwa kebijakan publik dapat diartika sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah (*the actions og government*).

Berikut ini definisi kebijakan Publik yang dikemukakan oleh beberapa parah ahli:

1. Thomas R. Dye (1978), *Public policy is whatever governments choose to do or not to do* (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
2. James E. Anderson (1979), *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu).
3. William J. (1978), *Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve* (Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau sekelompok aktor publik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogiannya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya).
4. Charles L. Cochran & Eloise F. Malone (1995), *Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals, public policy consist of a plan of action or destination* (Kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat, kebijakan publik berisi sebuah rencana tindakan atau kata lain, sebuah peta dan sebuah tujuan).
5. Larry N. Gerston (2002), *Public policy making is the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or affect government positions* (Kebijakan publik adalah gabungan dari berbagai keputusan, komitmen dan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan atau yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan).
6. Phillip Mooper, et al. (1998), *A policy is an answer to the problem* (Kebijakan adalah jawaban atas masalah).

Menurut Chief J.O. Udoji dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) kebijakan publik adalah sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah yang mengarah kepada suatu tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan baik di masyarakat maupun di pemerintahan yang berkaitan.

Menurut Hugwood & Gunn dalam (Hayat, 2018) berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari sepuluh definisi, yaitu:

- 1) Kebijakan sebagai merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*). Merk atau label dari kebijakan akan menjadi sebuah berkesinambungan dan menjadi program rutin yang diselenggarakan serta melekat dalam diri kebijakan tersebut.
- 2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dihendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*)
- 3) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*). Usulan-usulan yang muncul serta *bottom up* dan *top down* yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*). Apapun langkah yang dilakukan pemerintah oleh pemerintah dalam pengambilan keputusannya adalah kebijakan publik.
- 5) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*), yaitu seperti kebijakan yang berbentuk regulasi dari pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, yang dilakukan melalui pengesahan secara formal.
- 6) Kebijakan sebagai program (*as programme*). Program-program pemerintah adalah bagian dari kebijakan publik.

- 7) Kebijakan sebagai keluaran (*as output*). Kebijakan sebagai keluaran berarti setiap kebijakan publik pasti mempunyai keluaran yang diharapkan.
- 8) Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*). Merupakan hasil akhir dari program-program kerja yang sudah dilakukan.
- 9) Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*). Berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan yang menghasilkan berbagai *output* atau *outcome* untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan bagi pemerintah.
- 10) Kebijakan sebagai proses (*as process*). Sebagai proses, kebijakan akan mempunyai keterkaitan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya.

Pengertian kebijakan publik mempunyai banyak tafsiran dan makna, tetapi secara prinsip dan esensi adalah sama. Pandangan dan paradigma kebijakan publik sebagai sebuah ilmu mempunyai cara pandang tersendiri bagi sebagian ahli.

Menurut Said Zainal Abidin, tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, yaitu:

- a) Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c) Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d) Adil.

- e) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Tujuan Kebijakan Publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.
- 2) *Regulatif* dan *deregulatif*, kebijakan regulatif bersifat mengatur membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan.
- 3) *Dinamis* dan *stabilisasi*, kebijakan dinamis adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial.
- 4) Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat Negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran suatu negara. (Hayat, 2018).

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Jones dalam (Widodo, 2021) implementasi sebagai *a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*, dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (2004:65) dalam (Lumempow, Sambiran, & Rachman, 2021) implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Karmanis & Karjono, 2020) implementasi merupakan suatu tahapan dari proses kebijakan publik, sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka mencapai kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:4) dalam (Widodo, 2021) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which impacts on people and events.* Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Wahab dalam (Mustari, 2015) Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan.

Menurut (Tachjan, 2006) implementasi kebijakan adalah sebagai aktivitas pelaksanaan atau penyelesaian kebijakan publik yang telah ditetapkan atau

disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

Menurut Jones (Widodo, 2021) aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*), yaitu tahapan penjabatan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.
2. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*), yaitu lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksanaan kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya.
3. Tahap Aplikasi (*Application*), yaitu merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapam yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kebijakan publik terdapat model implementasi menurut model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan,yaitu:

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Yaitu sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Pengetahuan atas apa yang mereka

kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan dengan personil yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

Terdapat tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi diatas, yaitu:

- a. Transmisi (*Transmission*), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi ini tidak hanya disampaikan kepada pihak pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran atau pihak yang berkepentingan baij secara langsung maupun secara tidak langsung.
- b. Kejelasan (*Clarity*), kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak yang berkepentingan lain dapat diterima dengan jelas mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran suatu kebijakan. Jika tidak jelas pihak-pihak yang terkait tidak tahu apa yang semestinya mereka lakukan agar kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- c. Konsistensi (*Consistency*), perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten (diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dimana sumber-sumber daya tersebut meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia (staff), sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan disebabkan oleh staff yang terbatas atau tidak mencukupi dari jumlah yang dibutuhkan maka pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif.
 - b. Sumber Daya Anggaran, sumber daya keuangan ini mempengaruhi efektivitas keberhasilan pelaksanaan dari suatu kebijakan.
 - c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*), yaitu sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan. Terbatasnya suatu fasilitas dapat terjadi kegagalan dalam suatu pelaksanaan kebijakan karena akan sulit mendapatkan informasi yang akurat sehingga merugikan akuntabilitas serta kurang menunjang efisiensi dan motivasi.
 - d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan, informasi penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan kewenangan mempengaruhi dari efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan.
3. Disposisi (*Disposition*)

Faktor dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu implementasi kebijakan ingin berjalan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Hal yang perlu dicermati dalam disposisi menurut Edward III, yaitu:

- a. Efek disposisi, sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan jika personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan.
 - b. Melakukan pengaturan birokrasi, suatu implementasi kebijakan merujuk pada pangkat staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Intensif, cara menambahkan biaya dan keuntungan tertentu akan menjadi faktor pendorong bagi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu perintah dengan baik.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi kurang kondusif terhadap kebijakan yang tersedia maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III yang dapat memudahkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, yaitu:

- a. Melaksanakan Fragmentasi (*Fragmentation*), yaitu untuk menyebar tanggungjawab dalam berbagai aktivitas, program, dan kegiatan pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.
- b. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOPs), SOPs merupakan suatu prosedur atau aktivitas yang terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan standar yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau tahapan yang sangat penting dalam serangkaian proses dari berbagai individu, kelompok dan pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Konsep Efektivitas Kebijakan

Menurut Mulyas dalam (Badu & Djafri, 2017) efektivitas merupakan gambaran langkah keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan kekuasaannya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Menurut Steers (2008:87) dalam (Maun, 2020) Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut (Badu & Djafri, 2017) Efektivitas adalah lebih menekankan pada perbandingan antara rencana dan pencapaian tujuan atau hasil dari apa yang telah direncanakan/ ditetapkan sebelumnya.

Dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan seberapa besar tingkat pencapaian tujuan dari segala kegiatan yang telah dilakukan dan di bandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut (Streers, 2020) efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu, untuk memenuhi

tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut (Daniarsyah, 2020) efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Muasaroh (2010), efektivitas bisa dijelaskan bahwa efektivitas sebuah program yang dilihat dari beberapa aspek yang telah dicapai antara lain:

a) Aspek Tujuan

Suatu program bisa dikatakan efektif apabila suatu program yang dibuat telah mencapai hasil dan tujuan yang telah ditentukan.

b) Aspek Tugas Dan Fungsi

Lembaga atau suatu organisasi dikatakan efektivitas apabila telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

c) Aspek Rencana Atau Program

Rencana program merupakan penentuan rencana program yang akan dicapai dengan menyusun asumsi-asumsi yang bakal terjadi di masa datang.

d) Aspek Ketentuan Atau Peraturan

Efektivitas suatu program bisa dilihat dari beberapa fungsi dan ketentuan yang sudah dibuat dalam rangka menjaga suatu proses kegiatan.

Menurut Komaruddin dalam (Mendome, Tulus, & Mambo, 2021) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teori efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2007: 125-127) terdiri dari beberapa indikator antara lain yaitu:

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program Bantuan Langsung Tunai.
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang diberikan para pengelola Program Bantuan Langsung Tunai mengenai pemahaman pengetahuan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.
3. Tepat Waktu, yaitu dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan nyata, yaitu dilihat melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahannya bagi masyarakat ditempat.

Setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk suatu program akan dilihat keefektifan dari program-program yang bersangkutan. Efektivitas kebijakan sendiri merupakan keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut dapat dicapai secara tepat waktu.

7. Konsep Program Kebijakan

Menurut Nawawi dalam (Andriani, 2018) program merupakan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut KBBI dalam (Andriani, 2018) Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Kata program artinya rancangan mengenai atas serta usaha yang dilakukan. Program dapat dikatakan sebagai rancangan yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan meskipun semuanya tidak bisa direalisasikan.

Program kebijakan merupakan suatu tindakan atau arahan yang diambil dari pemerintahan pusat yang memiliki isi satu atau sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam mencapai suatu tujuan yang berdampak positif terhadap pemerintahan itu sendiri atau masyarakat luas.

Suatu pemerintahan tentu tidak akan lepas dari yang namanya program, dimana program yang bersangkutan di buat atas kebijakan pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan, Negara Indonesia sudah banyak membuat program dari kebijakan instansi pemerintahan yang ada di pusat, kebijakan-kebijakan yang dibuat ada yang membawa dampak positif dengan artian masyarakat luas tidak protes atas kebijakan yang dilakukan pemerintahan yang terkait.

Program kebijakan yang dilakukann pemerintahan pusat yang dibuat kondisi saat ini dalam masa pandemi covid-19 yaitu BLT bagi pelaku UMKM,

berlaku pada masa jabatan Joko Widodo dalam membantu masyarakat yang memiliki badan usaha yang terdampak pandemi covid-19 yang terjadi dua (2) tahun terakhir ini. Pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program BLT, agar BLT tersebut berguna untuk meningkatkan usaha yang mereka miliki dengan menambahkan sebagai modal usaha yang sempat berkurang akibat pandemi yang terjadi hingga saat ini.

Menurut (Maun, 2020) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik.

8. Konsep UMKM

UMKM menurut (Handini, Sukesni, & Kanty, 2019) adalah suatu bentuk usaha yang dibuat atas inisiatif atau kemauan sendiri masyarakat. Masyarakat sebagian besar beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan bagi pihak yang memiliki UMKM saja. Sebenarnya adanya UMKM tentu akan mengurangi angka pengangguran di Negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau , menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria-kriteria UMKM yaitu sebagai berikut:

No	Kriteria	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
1.	Usaha Mikro	Maks. Rp. 50.000.000,-	Maks. Rp. 300.000.000,-
2.	Usaha Kecil	Rp.50.000.000,-s/d Rp.500.000.000,-	Rp.300.000.000,-s/d Rp. 2.500.000.000,-
3.	Usaha Menengah	Rp.500.000.000,-s/d.Rp. 10.000.000.000,- (10M)	Rp. 2. 500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-(50M)

- 1 Kekayaan bersih: hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha.
- 2 Hasil penjualan tahunan: hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang & atau jasa usahanya dalam 1 tahun buku.

UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memepluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat

berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut (Sulastri , 2016) UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengatasi dan meminimalisirkan pengangguran, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha.

Dari penjelasan di atas bahwa UMKM dapat pula diartikan sebagai usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara, yang mampu membuka lapangan pekerjaan serta sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.I: Kerangka Pikiran Penelitian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

C. Konsep Operasional

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Kebijakan adalah untuk melihat suatu perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu lembaga pemerintah dalam suatu kegiatan dibidang tertentu.
5. kebijakan publik adalah sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau bada pemerintah di dalam suatu bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.
6. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan.
7. Implementasi kebijakan adalah sebagai aktivitas pelaksanaan atau penyelesaian kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan kebijakan.

8. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu, untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.
9. Program merupakan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
10. Program kebijakan merupakan suatu tindakan atau arahan yang diambil dari pemerintahan pusat yang memiliki isi satu atau sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang berdampak positif terhadap pemerintahan itu sendiri atau masyarakat luas.
11. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik.
12. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program Bantuan Langsung Tunai.
13. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang diberikan para pengelola Program Bantuan Langsung Tunai mengenai pemahaman pengetahuan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.

14. Tepat Waktu, yaitu dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
15. Tercapainya tujuan, yaitu dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
16. Perubahan nyata, yaitu dilihat melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahannya bagi masyarakat ditempat.
17. UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.
18. Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
<p><i>Efektivitas</i> adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan (Sutrisno, 2007:125-126).</p>	<p>Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai</p>	1. Pemahaman Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan masyarakat terhadap program b. Sumber informasi tentang program.
		2. Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketepatan penerima program BLT UMKM. b. Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat
		3. Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan b. Keberlanjutan program
		4. Tercapainya Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya tujuan program yang telah ditentukan b. Adanya pengawasan terhadap program, agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
		5. Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none"> a. Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM. b. Kebermanfaatn program bagi penerima BLT UMKM.

Sumber: Modifikasi penulis, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif, merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi variabel penelitian. Data yang dilaporkan merupakan data yang diperoleh peneliti apa adanya sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung saat itu.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono (2018:38), menyatakan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, terarah dan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui informan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, penulis meninjau bagaimana Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan berjalan secara efektif.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat beberapa pelaku UMKM mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun, masih tidak tepat pada sasaran dan apakah bagi pelaku UMKM terjadi peningkatan pendapatan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi covid-19 serta ketidak tepat sasaran Bantuan Langsung tunai (BLT) sehingga program BLT tidak efektif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Informan Dan Key Informan

Sehubungan dengan Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka peneliti menggunakan informan dan key informan.

Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi atau keterangan yang berupa fakta yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Meleong (2000:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentu sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Informan dalam penelitian kualitatif memiliki dua tipe yang sering digunakan yaitu informan dan key informan. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1: Informan dan Key Informan Penelitian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

NO	Responden Penelitian	Informan	Key Informan
1.	Pegawai BRI	-	1
2.	Kasi Pembangunan & pemberdayaan	1	-
3.	Sekdes	1	-
4.	Pelaku UMKM	10	-
Jumlah		12	1

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian di lapangan serta observasi yang berkaitan dengan masalah efektivitas kebijakan program bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM di masa pandemi di kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian, meliputi;

- a. Sejarah ringkas Kecamatan Pangkalan Kuras
- b. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku UMKM

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai tujuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam ini ada beberapa hal pengambilan data yang dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera penglihatan atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pendekatan langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dan kondisi dari daerah penelitian.

2. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pelaku UMKM, kepada salah satu pegawai Bank Bri, kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang terlibat dalam program BLT bagi pelaku UMKM.

3. Dokumentasi

Yaitu bentuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, rekaman, dan sebagainya dalam proses penelitian berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam deskriptif dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung sehingga dapat di tarik kesimpulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu ke																											
		Nov				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Juni-Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2
1.	Penyusunan UP	X	X		X	X	X	X																					
2.	Seminar UP									X																			
3.	Revisi UP											X	X																
4.	Rekomendasi Survey																X												
5.	Survey Lapangan																X	X	X	X									
6.	Analisis Data																			X	X	X							
7.	Penyusunan laporan hasil penelitian																			X	X	X							
8.	Konsultasi revisi skripsi																								X	X			
9.	Ujian Komprehen-sif																											X	
10.	Revisi skripsi																											X	
11.	Pengandaan skripsi																											X	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Terbentuknya Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah Kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999 merupakan daerah pemekar dari Kabupaten Kampar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian oprasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 05 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan juga merupakan wilayah pedesaan (Rural Area), hal ini antara lain dicirikan dari kepadatan penduduk relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan, kondisi penggunaan tanah umumnya bersifat pertanian, mata pencarian penduduk umumnya di sektor pertanian, serta komposisi pendapatan regional terbesar juga dari sektor pertanian.

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

B. Luas Wilayah dan Kependudukan

Luas Kabupaten Pelalawan 1.392.494 Ha, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang

ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendol (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuah dan Pulau-pulau lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 365.817 Jiwa dengan kepadatan penduduk 0,30 jiwa/ha, di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 104 Desa dan 14 Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, perkebunan transmigrasi.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera di belahan tengah Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak pada koordinat $1^{\circ} 25'$ Lintang Utara sampai $0^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 42'$ Bujur Timur sampai dengan $103^{\circ} 28'$ Bujur Timur dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu Dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan:

1. Bandar Petalangan, Luas 36.996,29 Ha
2. Bandar Seikijang, Luas 31.856,87 Ha
3. Bunut, Luas 40.620,09 Ha
4. Kerumutan, Luas 95.314,31 Ha
5. Kuala Kampar, Luas 80.905,31 Ha
6. Langgam, Luas 142.396,15 Ha
7. Pangkalan Kerinci, Luas 18.716,16 Ha
8. Pangkalan Kuras, Luas 117.746,75 Ha
9. Pangkalan Lesung, Luas 50.159,83 Ha
10. Pelalawan, Luas 147.060,05 Ha
11. Teluk Meranti, Luas 391.140,47 Ha
12. Ukui, Luas 129.268,77 Ha

Tabel IV.1: Daftar Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan/Desa	Luas		Jumlah Jiwa	Penduduk %Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Ha)
		Ha	%Wilayah			
1.	Bandar Petalangan	36.996,29	2.89	14.517	4.53	0.36
2.	Bandar Sei Kijang	31.856,87	2.48	41.184	4.93	0.45
3.	Bunut	40.620,87	3.17	16.496	3.79	0.27
4.	Kerumutan	95.314,31	7.43	25.423	5.76	0.18
5.	Kuala Kampar	80.905,73	6.31	18.198	7.96	0.27
6.	Langgam	142.396,15	11.11	33.440	7.59	0.11
7.	Pangkalan Kerinci	18.716,16	1.46	134.672	5.55	3.81
8.	Pangkalan Kuras	117.746,16	9.18	66.221	24.36	0.35
9.	Pangkalan Lesung	50.150,83	3.91	33.509	14.23	0.46
10.	Pelalawan	147.060,05	11.47	14.513	7.89	0.10
11.	Teluk Meranti	391.140,47	30.51	19.410	4.96	0.05
12.	Ukui	12.286,77	10.08	41.204	6.64	0.22
Total		1.268,77	100.00	460.780	100.00	0.23

Sumber: Hasil Perhitungan Peta Digital, Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau (2018) dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan (2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, penduduk

Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah sebanyak 460.780 Jiwa. Paling

banyak terdapat di Kecamatan Pangkalam Kerinci 134.672 Jiwa di susul Kecamatan Pangkalan Kuras 66.221 Jiwa dan Paling sedikit di Kecamatan Bandar Petalangan 14.517 Jiwa.

Setelah dikombinasikan dengan data luas wilayah menurut hasil perhitungan peta digital (1.282.181,47), di peroleh angka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 0,23 Jiwa/Ha bisa ditinjau dari segi kepadatan penduduk Perkecamatan, Kecamatan Pangkalan Kerinci menduduki tempat teratas dengan kepadatan 3,81 Jiwa/Ha. Kondisi ini di mungkinkan mengingat tipikal daerah tersebut merupakan pusat aktivitas perekonomian dan Pemerintah yang terkonsentrasi di Kota tersebut, sedangkan kepadatan paling rendah berada di Kecamatan Teluk Meranti yaitu 0.05 Jiwa/Ha.

Ditinjau dari aspek fisiografis, Kabupaten Pelalawan sebagian besar merupakan dataran rendah. Dilihat dari ketinggian beberapa daerah atau Kota di Kabupaten Pelalawan dari permukaan laut berkisar antara 2-40m. Daerah atau Kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek Satu (Pangkalan Kuras) dan Pangkalan Lesung dengan masing-masing diatas 30m dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kuala Kampar) 2m dari permukaan laut.

C. Kecamatan Pangkalan Kuras

Wilayah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Namun setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD. Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9

(sembilan), yakni terdiri dari 4 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki segarab penggunaan lahan yang cukup merata, hal ini dapat dilihat dari hasil interpretasi citra penggunaan lahan yang terluas di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Hutan seluas 35.737,06 Ha atau 30,16% dan Perkebunan Sawit seluas 25.366,77 Ha atau 21,51% dari luas Kecamatan pengguna lahan yang paling terkecil yaitu Ladang atau tegelan yaitu 45,79 Ha atau 0,04% dan semak atau alang-alang seluas 222,10 Ha atau 0,19%.

Tabel IV.II Daftar Penduduk Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Desa/Kelurahan	Luas KM 2	Penduduk		
			LK	PR	Jumlah
1.	Sorek Satu	80,00	5,539	7,712	13,251
2.	Sorek Dua	115,00	1,209	972	2,181
3.	Dundangan	144,00	1,668	2,053	3,721
4.	Terantang Manuk	22,50	1,622	1,681	3,303
5.	Palas	95,00	1,127	1,111	2,238
6.	Kemang	103,00	1,775	1,639	3,414
7.	Betung	50,00	759	703	1,462
8.	Kusuma	510,00	8,682	8,236	16,918
9.	Talau	83,00	1,176	1,038	2,214
10.	Tanjung Beringin	17,00	958	1,011	1,967
11.	Surya Indah	12,90	811	766	1,577
12.	Beringin Indah	13,20	903	831	1,734
13.	Sialang Indah	13,50	1,224	1,164	2,388
14.	Meranti	10,40	855	728	1,583
15.	Harapan Jaya	13,50	770	773	1,543
16.	Batang Kulim	68,00	1,805	1,812	3,617
17.	Sidomukti	6,80	990	917	1,907
Jumlah		847,37	31,871	33,147	65,018

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

1. Visi Misi Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan

a. Visi

Perubahan Menuju Terwujudnya Pelayanan Maksimal, Seni Budaya Dan Kerukunan Masyarakat.

b. Misi

1. Meningkatkan Sumber daya Apartur Pemerintah.
2. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana.
3. Menciptakan sarana pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat.
4. Meningkatkan sarana seni dan budaya.
5. Meningkatkan sarana keagamaan.

D. Sejarah Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM

Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakandi Brasil pada tahun 1990-an dengan nama *Bolsa Escola* dan berganti nama menjadi *Bolsa Familia*. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inacio Lula dan Silv, presiden Brasil ke-35. *Bolsa Familia* masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26% penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru Negara-Negara lain.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, pemerintah memutuskan untuk memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM subsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang kalangan

industri dan berstatus mampu. Kemudian, di data lebih lanjut diketahui pada tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar subsidi telah digunakan sebanyak 75%. Pemotongan subsidi terus menerus terjadi hingga 2008 dengan kenaikan sebesar 50%. Untuk mengulangi kenaikan harga bahan pokok bagi kelompok miskin, Pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005.

Program ini di buat oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2004. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 12 digalanganlah program bantuan langsung tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Pada tahun 2008 BLT kembali diselenggarakan berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT dengan nama lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Pemerintah Indonesia resmi memberikan subsidi gaji kepada para pekerja secara nasional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan tunai ini merupakan langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu publik menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai UMKM (BPUM) di atur dalam peraturan menteri koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan mendukung pemulihan ekonomi dengan bersumber dari

Anggaran pendapatan belanja Negara. Program ini hampir serupa dengan program yang digulirkan pemerintah pada tahun 2005 lalu yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Key Informan* dan Informan

1. *Key Informan* yaitu terdiri dari:
 - a. Pegawai Bank BRI Sorek Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2. Informan terdiri dari:
 - a. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Sekdes Di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
 - c. Pelaku UMKM Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Selanjutnya demografi informan yang menjadi informan penelitian ini seperti dijelaskan berdasarkan jabaran di bawah ini:

1. *Key Informan* dan Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam pelaksanaan wawancara kepada responden, langkah pertama yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas *Key Informan* dan Informan, dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan *Key Informan* dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel V.I *Key Informan* dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	D3	1
2.	SMA/MA	10
3.	SMP/SLTP	2
Jumlah		13

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi

Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dilihat dari tingkat pendidikan, pada tingkat pendidikan D3 berjumlah 1 orang, pada tingkat pendidikan SMA/MA berjumlah sebanyak 10 orang dan pada tingkat pendidikan SMP/SLTP ada 2 orang dengan jumlah keseluruhan responden sebanyak 13 orang.

2. Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan Key Informan dan Informan dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitasnya berdasarkan tingkat umur, yaitu:

Tabel V.II Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1.	25-30 Tahun	5
2.	30-34 Tahun	3
3.	35-39 Tahun	3
4.	40-49 Tahun	1
5.	50-59 Tahun	1
Jumlah		13

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan dari tabel di atas diketahui tingkat umur 25-30 tahun berjumlah 5 orang, umur 30-34 tahun berjumlah 3 orang, umur 35-39 tahun berjumlah 3 orang, 40-49 tahun berjumlah 1 orang, dan umur 50-59 tahun berjumlah 1 orang. Dengan demikian Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan mewakili semua kalangan umur sehingga dinilai dapat memberikan jawaban yang objektif.

3. Key Informan dan Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Selanjutnya, untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas Key Informan dan Informan ini juga akan melihat jenis kelamin dari Informan. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisis data, namun dinilai perlu kelengkapan data Key Informan dan Informan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah Informan berdasarkan jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.III Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	8
2.	Laki-Laki	5
Jumlah		13

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis kelamin *Key Informan* dan informan yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang dan yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu, untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Suatu program dikatakan efektif apabila suatu usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai hasil dan tujuan yang telah diharapkan. Melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil atau tujuan suatu program dicapai.

Program BLT bagi pelaku UMKM hal penting bagi keberhasilan suatu program. Pemahaman program bagi pelaku UMKM di Kecamatan mengenai program ini akan berguna demi menciptakan atau mewujudkan efektivitas program yaitu melalui sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah untuk pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Ada beberapa indikator yang penulis paparkan untuk mengetahui pembahasan di dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dan indikator-indikator penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yaitu adalah Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan masing-masing item pertanyaan yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Pemahaman Program, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan wawancara yang penulis lakukan pada BLT bagi pelaku UMKM.

Berikut ini hasil penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras:

1. Pemahaman Program

Menurut Edy Sutrisno (2007: 125-127) Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program Bantuan Langsung Tunai.

Pada Pemahaman Program ini terdapat dua sub indikator yang akan di bahas yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras

Hasil wawancara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yang dilakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu M. Rizki Maulana sebagai Key Informan dalam penelitian ini mengenai Pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Oke baik, menurut saya untuk masyarakat yang di Kecamatan Pangkalan Kuras yang saya tangani rata-rata mereka sudah paham dan mengetahui mengenai program bantuan BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah ataupun pihak yang terkait dalam menyalurkan program BLT pada saat pandemi Covid-19 ini” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana sebagai pegawai Bank BRI yang dijadikan sebagai *Key Informan* dalam penelitian ini diketahui bahwa pemahan program bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras selama ini yang ditangani oleh Bapak M. Rizki Maualan sendiri bahwa masyarakat sudah paham dan memiliki pengetahuan mengenai BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi. Karena, Bapak M. Rizki Maulana bekerja sebagai pegawai Bank BRI selama ia membantu masyarakat pelaku UMKM pada masa pandemi yang ingin mencairkan dana BLT ia melihat bahwa masyarakat pada saat itu tahu dan memahami mengenai BLT untuk pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kasih Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai informan peneliti, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan kami dari pihak kecamatan memang ada dua penilaian, pertama ada masyarakat yang tahu dan ada masyarakat yang tidak tahu mungkin itu jawaban dari kami” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk, pada tanggal 06 April 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Jorhan A.Mk dapat ketahui dalam pemahaman program bahwa ada masyarakat yang tahu mengenai program BLT dan ada juga masyarakat yang tidak tahu mengenai program BLT yang dibuat oleh pemerintah di masa pandemi. Karena di Kecamatan Pangkalan Kuras sepengetahuan Bapak Jorhan A.Mk ada masyarakat pelaku UMKM yang tahu dan memahami program BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah pada masa pandemi dan ada juga masyarakat yang

tidak tahu sama sekali mengenai BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah. Hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat yang tidak mengakses informasi atau tidak mendapatkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah.

Dan penelitian ini juga melakukan wawancara dengan Bapak Suardi salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai informan dalam penelitian, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan saya sebagaian besar masyarakat sudah banyak mengetahui mengenai program BLT ini terutama yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi mengenai pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat dari sebagian masyarakat sudah banyak yang mengetahui mengenai program BLT bagi pelaku UMKM terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena sepengetahuan Bapak Suardi sebagai Sekdes bahwa masyarakat sekitar tempat ia bertugas sudah sebagian besar mengetahui mengenai BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah di masa pandemi, di sekitar ia bertugas juga ada beberapa masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM yang mendapatkan BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menjadikan masyarakat sebagai informan penelitian, hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya masyarakat pelaku UMKM belum banyak yang mengetahui mengenai program BLT yang diberitkkan pelaku usaha ditengah pandemi yang di buat Pemerintah dalam penambahan modal

usaha”(Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM yang menerima bantuan BLT bagi pelaku UMKM yaitu Ibu Nurhaidah bahwasanya masyarakat pelaku UMKM dalam pemahaman program BLT masih belum banyak pelaku UMKM atau yang memiliki usaha tahu mengenai program BLT di masa pandemi untuk penambahan modal usaha. Karena Ibu Nurhaidah melihat bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggalnya belum banyak yang mengetahui program BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh pemerintah dalam penambahan modal bagi usaha yang masyarakat miliki, ketidak tahuan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras ini disebabkan karena keterbatasan informasi yang diperoleh sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program BLT bagi pelaku UMKM yang dijalankan Pemerintah pada masa pandemi.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rian sebagai berikut:

“Menurut saya kurang banyak masyarakat yang mengetahui program BLT ini”(Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara tersebut Bapak Rian melihat masih kurang banyak masyarakat yang tahu dalam pemahaman program BLT yang dibuat oleh Pemerintah terutama bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Karena ada sebagian masyarakat pelaku UMKM disekitar usaha yang Bapak Rian miliki justru tidak tahu mengenai program BLT yang disalurkan oleh Pemerintah untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 disebabkan masyarakat tersebut tidak mendapatkan informasi mengenai BLT yang disalurkan untuk pelaku usaha di tengah pandemi. Hal seperti ini terjadi karena masyarakat

tersebut kurang update terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat pelaku usaha di tengah pandemi serta kurangnya mencari informasi mengenai BLT dari Pemerintah.

Hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya si banyak masyarakat pelaku UMKM yang mengetahui mengenai program BLT ini” (Wawancara dengan Ibuk Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Febri sebagai pelaku UMKM yang menerima BLT UMKM sebanyak 2 (Dua) kali dalam pemahaman program BLT banyak masyarakat pelaku UMKM yang mengetahui program BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena selama 2 (dua) kali mencairkan BLT ke pihak Bank Bri banyak masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan, sehingga dari pengamatan Ibu Febri dapat dilihat bahwa masyarakat sudah banyak yang mengetahui program BLT ini, dimana BLT tersebut dibuat untuk penambahan modal bagi pelaku usaha yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 pada saat ini.

Dan Wawancara dengan Ibuk Yanti sebagai pelaku pelaku UMKM yang menerima BLT UMKM yaitu sebagai berikut:

“Hmm kurang banyak si yang mengetahuinya mengenai program ini menurut saya” (Wawancara dengan Ibuk Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu Ibuk Yanti mengenai Pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwa masyarakat kurang banyak yang mengetahui program BLT ini. Karena keterbatasan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang masih kurang, sehingga masih ada masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang kurang paham dan mengetahui kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM pada saat ini.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengenai pemahaman program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras pada masa pandemi sebagai berikut:

“Menurut saya tidak banyak yang tahu hmm karena kita selaku masyarakat kecil gitukan cuman tidak semuanya tahu mengenai program ini”. (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM mengenai Pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Abdullah menilai bahwa di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak banyak masyarakat terutama bagi yang memiliki usaha UMKM paham dan tahun terhadap program BLT untuk para pelaku usaha. Karena jika dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah bahwa masyarakat yang masih memiliki usaha kecil di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak banyak yang tahu dalam program BLT yang dibuat oleh Pemerintah di masa pandemi, ia mengatkan bahwa masyarakat yang memiliki usaha yang masih kecil

termasuk ia sendiri tentu kurang informasi yang di dapatkan sehingga program yang ada tidak diketahui oleh masyarakat tersebut.

Wawancara dengan masyarakat penerima BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu dengan Ibu Dewi Saputri sebagai berikut:

”Kalau menurut saya sih belum ya soalnya masih ada masyarakat di sini masih belum banyak memiliki pengetahuan tentang program dari Pemerintahan ini” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri salah satu masyarakat penerima BLT UMKM Ibu Dewi menjelaskan bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tersebut masih belum banyak yang memiliki pengetahuan tentang program yang di buat Pemerintah. Karena dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Dewi Saputri bahwa ia melihat masyarakat sekitar tempat tinggalnya masih ada yang tidak memiliki pengetahuan tentang program yang dibuat Pemerintah pada masa pandemi.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami sedangkan pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, dalam hal ini yaitu program BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan Pemerintah masyarakat khususnya di Kecamatan Pangkalan Kuras harus tahu dan paham terhadap program ini agar bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan BLT untuk penambahan modal usaha dan untuk membangkitkan usaha yang dimiliki yang terdampak Covid-19.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT UMKM mengenai pemahaman masyarakat mengenai program BLT yang dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi yaitu sebagai berikut:

“Hm kalau menurut saya itu belum banyak sebagian masyarakat itu belum tahu gitu apa yang dimaksud dengan BLT dan segala macamnya” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT yaitu Ibu Lilis terlihat bahwa masih banyak sebagian masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai BLT yang di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi bagi pelaku UMKM. Ibu Lilis sebagai masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi melihat bahwa masyarakat disekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Pangkalan Kuras masih ada yang tidak tahu mengenai program BLT bagi pelaku UMKM bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham terhadap pengertian BLT itu sendiri.

Dan wawancara dengan Ibu Siti sebagai masyarakat penerima BLT UMKM di masa pandemi yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya hm masyarakat itu belum mengetahui tentang program BLT ini dan juga belum mengetahui kemana arah BLT yang diberikan ini” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Ibu Siti terlihat ada masyarakat yang memiliki usaha UMKM belum mengetahui mengenai program BLT yang dibuat oleh Pemerintah bahkan masyarakat juga yang belum mengetahui arah atau tujuan program BLT yang dibuat Pemerintah di masa pandemi padahal tujuan program BLT ini dibuat untuk penambahan modal

usaha masyarakat yang memiliki usaha yang terdampak Covid-19 serta untuk memulihkan ekonomi pada masa pandemi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati sebagai berikut:

“Menurut saya belum karena banyak dari masyarakat pelaku UMKM yang kurangnya informasi mengenai program BLT tersebut dan tidak mengetahui cara mendaftarkan diri dari penerima program BLT tersebut” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lemawati pada tanggal 16 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati bahwa masih banyak masyarakat pelaku UMKM yang sangat kurang informasi mengenai program BLT bahkan masyarakat yang memiliki usaha atau pelaku UMKM tidak tahu cara atau langkah-langkah untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan BLT dikarenakan kurang pemahaman dari masyarakat itu sendiri terhadap program BLT bagi pelaku UMKM. Hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi dari pihak Pemerintah pusat atau Pemerintah setempat serta masyarakat pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak mencari tahu mengenai program yang disalurkan untuk membantu pelaku usaha sehingga masyarakat tidak tahu cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan BLT yang di salurkan oleh Pemerintah pada saat ini.

Dan wawancara dengan Ibu Meri Gustiani selaku masyarakat penerima BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai berikut:

“Menurut saya pengetahuan masyarakat mengenai program BLT ini masih sangat kurang karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kan ini program dari Pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani bahwa masyarakat masih sangat kurang paham mengenai program BLT yang dibuat Pemerintah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha. Ibu Meri Gustiani melihat karena kurang sosialisasi dari pihak Pemerintah sendiri banyak masyarakat pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan mengenai program BLT yang dibuat untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator Pemahaman Program maka dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator pengetahuan masyarakat terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras masih Kurang Efektif, karena jika dilihat dari hasil wawancara dari 1 orang Key Informan dan 12 Informan di Kecamatan Pangkalan Kuras ada 6 informan yang mengatakan bahwa masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan dan pemahan mengenai program BLT bagi pelaku UMKM 3 Informan mengatakan bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan mengenai program BLT bagi pelaku UMKM dan 4 informan yang mengatakan bahwa masyarakat tidak memiliki pemgetahuan dan pemahaman mengenai BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19.

b. Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras

Hasil wawancara dengan masyarakat tentang Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Sekdes di

Kecamatan Pangkalan Kuras Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras yang dijadikan sebagai *Key Informan* dalam penelitian ini yaitu dengan Bapak M. Rizki Maulana mengenai Informasi tentang Program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Baik yang saya ketahui mengenai program bantuan ini salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 dalam bentuk program BLT yang dibuat oleh yang disalurkan kepada pelaku UMKM yang sangat membantu bagi pelaku usaha yang sedang mengalami down dalam usahanya pada masa pandemi saat ini” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana Pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras Program BLT bagi pelaku UMKM merupakan suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 dalam bentuk program BLT yang disalurkan kepada pelaku usaha yang mengalami down atau keterpurukan usahanya pada masa pandemi. Masyarakat tentu membutuhkan penambahan modal bagi usaha yang dimilikinya yang sempat terdampak pandemi Covid-19 maka dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM di berbagai wilayah salah satunya yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kasih Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai informan peneliti, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Baik saya akan jawab sepengetahuan kami mengenai bantuan program langsung tunai untuk pelaku usaha yang di program oleh Pemerintah pusat itu pertama untuk membantu UMKM yang terdampak Covid sehingga masyarakat yang punya usaha terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-harinya salah satu contoh usaha UMKM yang terdampak yang kami lihat perta salah satunya di sekolah karena di sekolah dalam masa pandemi kemarin sekolah mulai tidak dilakukan secara tatap muka tetapi secara daring sehingga usaha-usaha yang ada di lingkungan sekolah banyak yang tidak melakukan usahanya sehingga terdampak dalam bidang ekonomi di masyarakat sehingga itu sangat menunjang membantu usaha masyarakat tersebut itu dari kami yang sangat mendukung kegiatan ini tersebut” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk selaku kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras yang Bapak Jorhan A.Mk ketahui yaitu program BLT ini dibuat oleh Pemerintahan pusat terutama dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak covid-19 agar usaha-usaha mereka jalani terbantu dalam penambahan modal atau untuk kebutuhan sehari-hari ia juga mengatakan bahwa program BLT bagi pelaku UMKM sangat menunjang perekonomian bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang usahanya terdampak pandemi pada saat ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Suardi sebagai informan dalam penelitian ini dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya program bantuan langsung tunai merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah pusat pada masa pandemi dalam sejumlah uang yang disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk penambahan modal serta pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Suardi terlihat dari wawancara dengan Bapak Suardi bahwa Program Bantuan langsung tunai ini merupakan suatu program yang dibuat oleh Pemerintah pusat dalam sejumlah uang yang disalurkan pada masa pandemi untuk masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Karena dengan BLT yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk uang dapat membantu masyarakat yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 meskipun ada masyarakat yang tidak menggunakan uang tersebut untuk modal usahanya dan dipergunakan untuk hal yang diluar tujuan dari program ini.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM yang mendapatkan BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menjadikan masyarakat sebagai informan penelitian, hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

“Yang saya ketahui mengenai program bantuan langsung tunai ini yaitu program yang di buat oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 dimana disalurkan kepada pelaku usaha yang mendaftarkan diri untuk penambahan modal usaha yang di keluarkan secara bertahap” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah mengenai Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras Ibu Nurhaidah berpendapat bahwa BLT ini sebuah program yang dibuat oleh

Pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang disalurkan kepada pelaku UMKM untuk menambah modal bagi pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan BLT tersebut, akan tetapi ada sebagian masyarakat juga di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang tidak memiliki usaha dan tidak mendaftarkan diri justru mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh pihak pemerintah pusat untuk masyarakat yang memiliki usaha dimasa pandemi pada saat ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Rian sebagai pelaku UMKM yang menerima bantuan yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya bantuan langsung tunai bantuan yang dibuat untuk penambahan modal dan untuk mengurangi beban masyarakat terutama pelaku umkm yang terdampak covid-19” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian mengenai Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Rian mengetahui bahwa bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM ini bantuan yang bukan semata-mata hanya dibuat Pemerintah begitu saja melainkan dibuat untuk penambahan modal bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 serta mengurangi beban bagi masyarakat yang memiliki usaha akan tetapi di Kecamatan Pangkalan Kuras ada masyarakat yang mendapat BLT ini yang bukan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga BLT yang diterima tidak dipergunakan semestinya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

“Yang saya ketahui bahwa program ini ya dari Pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat yang memiliki usaha” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku penerima BLT UMKM yang Ibu Febri ketahui mengenai program BLT ini suatu program yang dibuat oleh Pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat yang memiliki usaha UMKM. Karena pada masa pandemi Covid-19 yang menjelajahi Indonesia termasuk Wilayah-wilayah Provinsi hingga kabupaten dan Desa banyak pelaku usaha yang terdampak pandemi pada masa saat ini sehingga bagi masyarakat pelaku usaha membutuhkan bantuan untuk usaha yang dimiliki sehingga Pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program BLT dengan tujuan agar masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi usahanya terbantu dengan menggunakan BLT ini dengan sebaik mungkin dalam usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti selaku masyarakat penerima BLT sebagai berikut:

“Program BLT itu membantu meningkatkan kesejahteraan bagi pengusaha kecil atau UMKM di masa pandemi sekarang” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yanti selaku masyarakat yang memiliki usaha UMKM serta penerima BLT UMKM bahwa Program Bantuan Langsung Tunai untuk pelaku usaha di masa Covid-19 merupakan suatu bentuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di masa pandemi terutama bagi usaha kecil. Karena dengan adanya kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat

akan terbantu di saat Covid-19 dan meningkatkan usaha-usaha yang dijalankan pada saat ini

Hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM yang menerima BLT pada masa pandemi sebagai berikut:

“Menurut saya program ini salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk membantu pelaku usaha pada masa Covid-19 ini dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk usaha kecil dan bagi saya yang mendapatkan bantuan ini sangat-sangat menguntungkan sekali salah satunya saya sendiri sehingga saya bisa untuk melanjutkan usaha yang sekarang” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku pelaku UMKM dan menerima BLT dalam mengetahui program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 bahwa bantuan ini merupakan suatu program dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 dalam membantu pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki usaha yang tercampak Covid-19. Karena menurut Bapak Abdullah sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT pada saat pandemi ia sangat merasa bahwa BLT yang diberikan pemerintah sangat membantu dan menguntungkan bagin usaha kecil termasuk dirinya selaku masyarakat yang mempunyai usaha sehingga dengan BLT ini ia bisa melanjutkan usahanya yang sempat terdampak pandemi pada saat ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri selaku penerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

“Yang saya tahu ini sih program dari Pemerintahan untuk pelaku usaha yang terdampak akibat Covid-19 ini yang menimpah para pelaku UMKM

ini jadi di sini yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai itu saja sih yang saya tahu” (Wawancara dengn Ibu Dewi Saputri pada Tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT yaitu Ibu Dewi Saputri Program Bantuan Langsung Tunai Bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 merupakan program dari Pemerintahan yang diberikan untuk masyarakat pelaku usaha yang di salurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. BLT bagi pelaku UMKM ini dibuat oleh Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan usaha-usaha yang masyarakat miliki sehingga disalurkan dengan tujuan untuk membantu masayrakat pelaku usaha yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 pada saat ini.

Dari wawancara dengan Ibu Lilis penerima bantuang langsung tunai yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya bantuan dari Pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat dalam membuka usaha dan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang memiliki usaha” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis mengenai Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat bahwa bantuan langsung tunai ini bantuan yang dari Pemerintah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan digunakan untuk membuka usaha pada masa pandemi serta untuk membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal usaha pada masa pandemi. Karena yang diketahui bahwa program yag dibuat oleh Pemerintah yang disalurkan hanya untuk pelaku usaha saja tetapi yang tidak memiliki usaha juga mendapatkan BLT tersebut, dari hasil wawancara dengan Ibu Lilis terlihat bahwa ia mengatakan bahwa BLT juga membantu dalam

membuka usaha tetapi yang terjadi pada saat ini BLT tidak sepenuhnya masyarakat sebagai penerima menggunakan untuk keperluan usaha melainkan untuk keperluan diluar usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku penerima bantuan pada masa pandemi sebagai berikut:

“Menurut saya bantuan yang diberikan oleh pihak Pemerintah untuk menambah modal usaha yang saya tahu penerima BLT itu yang memiliki usaha terus mendapatkan uang tunai dimana Pemerintah menyalurkan dengan bertahap masing-masing tahap jumlah bantuan dalam bentuk uang tunai ini juga berdeda-beda”(Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat yang dijadikan informan oleh peneliti bahwasanya program BLT ini dibuat oleh Pemerintah untuk membantu pelaku usaha yang disalurkan dalam bentuk uang tunai secara bertahap dengan jumlah bantuan setiap tahapnya berbeda-beda. Dilihat dari keterangan yang diberikan Ibu Siti bahwa penerima program BLT hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha dan BLT tersebut dijadikan penambahan modal bagi masyarakat yang menerima untuk usahanya, sementara yang diketahui saat ini masih ada terdapat masyarakat yang bukan pelaku usaha atau tidak memiliki usaha mendapatkan BLT yang telah disalurkan oleh Pemerintah pada saat ini.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“Menurut saya program ini merupakan program yang diberikan oleh Pemerintah untuk orang-orang yang mempunyai usaha kecil dalam mencukupi penambahan modal dimasa pandemi sekarang”(Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat program BLT ini merupakan suatu program yang dibuat oleh Pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha dalam membantu penambahan modal kepada pelaku usaha yang usahanya terdampak Covid-19 pada saat ini. Karena dengan adanya program BLT ini cukup dapat terbantu bagi masyarakat pelaku usaha untuk membangkitkan usaha-usaha yang dimiliki masyarakat pada saat pandemi yang sempat mengalami keterpurukan dalam perekonomian masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Meri Gustiani selaku masyarakat yang menerima BLT UMKM yaitu sebagai berikut:

“Setahu saya program BLT ini diberikan kepada pelaku UMKM untuk membantu modal usaha bagi masyarakat” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT UMKM mengenai program BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi yaitu dengan Ibu Meri Gustiani bahwa program yang dibuat diberikan kepada pelaku usaha UMKM untuk membantu penambahan modal pada masa pandemi saat ini. Dengan BLT yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai maka masyarakat pelaku UMKM dapat menggunakan BLT tersebut untuk memulihkan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator pemahaman program maka dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator Informasi tentang program BLT bagi pelaku UMKMM di Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut hasil wawancara dengan 1 orang yang dijadikan Key Informan dan

12 yang dijadikan informan dalam penelitian ini jawaban yang diberikan oleh responden hampir sama secara keseluruhan bahwa program BLT merupakan suatu kebijakan pemerintah yang dibuat pada masa pandemi dalam bentuk sejumlah uang tunai yang disalurkan dan diberikan kepada masyarakat paleku UMKM yang membutuhkan untuk penambahan modal bagi usaha yang masyarakat miliki yang terdampak pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai informasi BLT cukup efektif. Karena, dilihat yang terjadi pada masa sekarang di saat pandemi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki usaha atau tidak termasuk pelaku UMKM bahkan tidak terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan BLT yang diberikan oleh Pemerintah yang seharusnya hanya disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang usahanya terdampak pandemi saja pada saat ini.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang diberikan para pengelola Program Bantuan Langsung Tunai mengenai pemahaman pengetahuan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.

Pada indikator Tepat Sasaran ini terdapat dua sub indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Hasil wawancara mengenai Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Bapak M. Rizki Maulana sebagai Key Informan Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya untuk program BLT ini sudah tepat sasaran karena banyak masyarakat yang memiliki usaha menerima bantuan ini mulai dari yang memiliki usaha kecil, menengah ke atas sudah mendapatkan program BLT ini” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwasanya program BLT yang dibuat oleh pemerintah pada masa pandemi bahwa BLT ini sudah tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras. Ia juga melihat bahwa program BLT ini sudah tepat sasaran kepada masyarakat pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang benar-benar membutuhkan untuk usaha dijalankan pada masa pandemi karena banyak masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah mendapatkan BLT yang dibuat oleh Pemerintah tersebut.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sepengetahuan kami karena program pelaku UMKM ini secara tidak langsung ini mendaftar secara online tentu banyak masyarakat kami yang tahu dia langsung memberikan pendaftaran langsung ke pendaftaran BLT UMKM yang ada di pusat maupun di provinsi sepengetahuan kami ini sangat tepat sasaran dan mungkin ada sedikit yang tidak tepat sasaran karena yang menentukan usaha tersebut orang Desa Kelurahan disitu dikeluarkan syarat salah satunya surat keterangan usaha karena pihak Kecamatan tidak ada yang ikut sertakan dalam reputasi dalam menentukan usaha UMKM tersebut” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jorhan A.Mk sebagai kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bahwa sepengetahuan pihak Kecamatan sebagian besar program BLT bagi pelaku UMKM sudah tepat diberikan kepada pelaku UMKM hanya sedikit saja program BLT ini tidak tepat sasaran. Karena masih ada masyarakat yang tidak pelaku usaha mendapatkan BLT yang disalurkan oleh Pemerintah pada saat ini Bapak Jorhan A.Mk juga menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan diri harus ada surat izin usaha dimana sebelum diterbitkan ke pihak Kecamatan ada surat pengantar dari Desa tempat pelaku usaha bertempat tinggal.

Hasil wawancara dengan salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Suardi dijadikan Informan dalam penelitian ini dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya BLT untuk pelaku UMKM ini sebagian sudah tepat sasaran diberikan kepada pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras dan sebagian lagi belum tepat sasaran kerena masih ada masyarakat yang bukan pelaku UMKM mendapatkan BLT tersebut”(Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suardi mengenai Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagian sudah tepat sasaran diberikan kepada pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras dan sebagian belum disebabkan masih ada masyarakat yang menerima BLT ini tetapi tidak memiliki usaha. Karena kurangnya verifikasi data dari Pemerintah sehingga masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima BLT mendapatkan BLT tersebut.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM yang menerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

”Menurut sepengetahuan saya bahwa BLT UMKM ini tidak sepenuhnya tepat sasaran karena banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan diri justru tidak menerima bantuan sementara ada masyarakat yang tidak memiliki usaha mendaftarkan diri justru mendapatkan bantuan ini” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Rian mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya program BLT bagi pelaku UMKM ini masih banyak yang tidak tepat sasaran terutama yang di Kecamatan Pangkalan Kuras ini.” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022)

Hasil wawancara dengan Ibu Febri sebagai masyarakat pelaku UMKM mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu:

”Menurut saya ya bantuan ini ada yang memang diberikan tepat kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan ada yang tidak tepat sasaran juga karena saya dengar ada yang bukan Pelaku usaha tetapi juga

mendapatkan.” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“Yang saya ketahui selama ini bantuan ini tepat diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dalam penambahan modal meskipun saya dengar ada yang tidak tepat sasaran juga” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu:

“Menurut saya BLT untuk pelaku UMKM sudah tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Pangkalam Kuras ini” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sendiri belum tepat ya soalnya disini masih banyak orang yang tidak memiliki usaha mala mendapatkan bantuan ini juga gitu jadi belum tepat sasaran” (Wawancara dengan Ibu Dewi pada tanggal 10 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya belum tepat sasaran karena saya pribadi yang bukan pelaku usaha saja mendapatkan bantuan ini” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“Kalau soal tepat sasaran saya tidak begitu tahu dan paham ya apakah ini diberikan untuk pelaku UMKM atau tidaknya tetapi ada sebagian ada orang yang bilang bahwa bantuan ini belum semuanya tepat sasaran” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut”

“Menurut saya masih kurang tepat diberikan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan di Kecamatan Pangkalan Kuras karena banyak dari masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi tidak memiliki usaha sementara yang memiliki usaha banyak yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Setahu saya untuk pembagian BLT ini sendiri itu masih kurang efektif ya karena sebagian ada yang tidak sepatutnya menerima tapi mendapatkan BLT tersebut” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 9 Mei 2022).

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dengan masyarakat yang menjadi informan mengenai ketepatan sasaran penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah ada masyarakat yang menilai bahwa program BLT bagi pelaku UMKM sudah tepat diberikan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan di Kecamatan Pangkalan Kuras dan sebagian hampir keseluruhan masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini

bahwa Program BLT bagi pelaku UMKM pada dasarnya masih tidak tepat sasaran karena masih banyak pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras tidak mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM sementara yang tidak memiliki usaha justru mendapatkan bantuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator tepat sasaran dapat disimpulkan pada sub indikator ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Kurang Efektif, karena BLT bagi pelaku UMKM sebgain sudah tepat diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19 sebgaiian besar belum tepat diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan BLT ini disebabkan ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki usaha justru mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah di masa pandemi untuk pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

b. Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan kuras

Hasil wawancara mengenai Hasil wawancara mengenai Ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara mengenai ketepatan penerima program BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri dengan Bapak M. Rizki Maulana di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai Key Informan dalam penelitian ini mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya kalau untuk program BLT ini sudah sangat sesuai diberikan untuk kebutuhan masyarakat dengan nominal yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi sebagai penambahan modal bagi usaha yang masyarakat miliki” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana sebagai pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwa keseluruhan program BLT bagi pelaku UMKM yang diberikan oleh Pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku usaha. Karena dilihat dari jumlah nominal yang diberikan kepada masyarakat pelaku UMKM untuk penambahan modal usaha yang masyarakat miliki pada masa pandemi nominal yang di dapat sudah bisa membantu para pelaku usaha untuk membangkitkan usahanya yang terdampak pandemi pada saat ini sehingga usanya yang masyarakat miliki bisa berjalan seperti biasanya.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sepengetahuan kami sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini sangat membantu masyarakat kita yang terdampak dalam bidang usaha disebabkan oleh pandemi tersebut” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk selaku kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah program BLT bagi pelaku UMKM yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM karena dilihat dari jumlah BLT yang diterima pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah bisa membantu para masyarakat yang memiliki usaha yang dimana usahanya terdampak pandemi Covid-19 pada saat ini serta membawa dampak baik bagi pelaku usaha dalam membangkitkan usahanya,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bicara mengenai BLT bagi pelaku UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum sesuainya dengan kebutuhan pada masa pandemi tentu masih kurang sesuai karena melihat dari jumlah nominal yang diberikan kepada masyarakat tetapi kalau untuk penambahan modal bagi usaha yang mereka jalankan masa pandemi masih cukup terbantu dengan BLT tersebut” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suardi Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai informan dalam penelitian mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras masih kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi dalam

penambahan modal bagi pelaku usaha masih terbantu dengan BLT ini. Karena jika dilihat dari nominal yang diberikan oleh Pemerintah masih kurang membantu untuk masyarakat jika BLT tersebut dijadikan penambahan modal untuk membantu membangkitkan usaha dimasa pandemi cukup terbantu untuk masyarakat pelaku usaha pada saat ini.

Hasil wawancara dengan masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu:

“Menurut saya selaku masyarakat yang menerima BLT ini bahwa program BLT bagi pelaku UMKM sudah sesuai untuk kebutuhan masyarakat yang memiliki usaha terutama dalam penambahan modal usaha dimana kita sama-sama ketahui masyarakat yang memiliki usaha pada saat pandemi mengalami cukup keterpurukan” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah selaku penerima BLT ini mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan kuras yaitu sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha pada masa pandemi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan terutama dalam penambahan modal usaha di saat pandemi. Karena dari jumlah yang diterima oleh Ibu Nurhaidah sendiri selaku pelaku usaha bahwa dengan jumlah nominal 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah cukup membantu ia untuk penambahan modal bagi usaha yang sedang mengalami keterpurukan pada saat pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian sebagai masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya sendiri ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras ini tetapi kalau

sepengetahuan orang lain saya juga kurang tahu” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rian tentang Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM bahwa program BLT ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena Bapak Rian merasa cukup dan terbantu dengan BLT yang disalurkan oleh Pemerintah dan ia juga mengatakan bahwa bagi masyarakat pelaku UMKM yang juga menerima BLT tersebut merasa terbantu atau tidaknya itu kembali lagi kepada diri masyarakat tersebut bagaimana mengantar dan menggunakan BLT tersebut sebaik mungkin untuk membantu membangkitkan usaha di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat sekarang.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang dijadikan Informan dalam penelitian ini mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya ya dibidang belum memang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM pada masa pandemi ini karena memang tidak cukup dalam segi penambahan modal tetapi kami pelaku usaha ini di cukup-cukupi saja”(Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku masyarakat yang memberikan informasi mengenai BLT adalah bahwa program BLT ini sebenarnya belum sesuai dan tidak mencukupi dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan BLT ini para pelaku usaha berusaha mencukupi dengan kebutuhan mereka dengan BLT bagi pelaku UMKM pada saat ini. Karena masyarakat pelaku UMKM cukup mengalami keterpurukan akibat

terdampak pandemi Covid-19 pada saat ini maka pelaku UMKM memerlukan dana untuk penambahan modal bagi usahanya yang cukup besar akan tetapi dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah masyarakat selaku penerima BLT berusaha mengatur BLT tersebut untuk mencukupi penambahan modal usaha.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu Ibu Yanti dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau bicara soal sesuai kebutuhan kalau di perhitungkan program BLT ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat pelaku UMKM” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yanti mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras sepengetahuan Ibu Yanti sendiri bahwa Program BLT ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat pelaku UMKM karena dari jumlah nominal dan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM pada masa pandemi ini belum sesuai. Karena jika bicara kesesuaian masyarakat pelaku UMKM tentu masih kurang cukup untuk penambahan modal usahanya yang terdampak pandemi Covid-19 yang cukup membawah dampak yang signifikan bagi usahanya dengan demikian masyarakat masih kurang merasa cukup dengan BLT yang diberikan oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya selaku saya penerima BLT UMKM ini bahwa program BLT bagi pelaku UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan saya sendiri sebagai pelaku usaha pada masa pandemi ini”. (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai masyarakat penerima BLT UMKM mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah yang dirasakan Bapak Abdullah bahwa program BLT bagi pelaku UMKM yang dijalankan terutama di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pelaku UMKM pada saat Covid-19. Karena Bapak Abdullah sendiri sudah merasakan bahwa BLT yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi sudah membantu dan sesuai harapan untuk membangkitkan usaha yang ia miliki yang sempat terdampak wabah pandemi saat ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri sebagai masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

“Menurut saya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM karena di masa pandemi ini banyak kebutuhan apa lagi bagi pelaku UMKM tentu program ini belum sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan pada masa sekarang ini” (Wawancara dengan Ibu Dewi pada tanggal 10 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM dengan adanya program BLT pada masa pandemi ini. Karena dilihat dari jumlah BLT dari Pemerintah yang para pelaku UMKM terima dengan kebutuhan yang mereka perlukan untuk penambahan modal bagi usaha yang dimiliki pada masa sekarang dan jumlah yang diberikan masih tidak seimbang untuk para masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT UMKM yang dijadikan informan terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya program BLT ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM karena belum cukup untuk memnuhi semua yang dibutuhkan masyarakat” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis sebagai masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalam Kuras Kabupaten Pelalawan dari segi kebutuhan para masyarakat pelaku UMKM pada masa Covid-19 program bahwa BLT ini belum mencukupi dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM terutama yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan dana yang terbilang cukup besar untuk modal usaha pada saat ini dengan BLT yang disalurkan bertahap dan tidak semua tahap dengan penerima yang sama maka dengan BLT yang disalurkan masih belum mencukupi kebutuhan bagi para masyarakat pelaku usaha pada masa pandemi.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Siti yaitu sebagai berikut:

“Dengan jumlah nominal segitu menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM apa lagi jika BLT ini dijadikan penambahan modal dalam usaha yang dimiliki” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti sebagai masyarakat yang menerima BLT UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di

Kecamatan Pangkalan Kuras. Dengan Ibu Siti menerima BLT UMKM pada saat ini bahwa program BLT yang dijalankan pemerintah pada masa pandemi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM. Karena dengan jumlah nominal yang diterima setiap masyarakat pelaku UMKM menurut Ibu Siti sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang masyarakat perlukan dalam penamabhan modal dalam membangkitkan usaha.

Dan berikut juga hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai berikut:

“Sebenarnya sudah sesuai tetapi dalam penambahan modal masih kurang karena dimasa sekarang segala kebutuhan meningkat sehingga dana yang diberikan tidak sepenuhnya mencukupi untuk pelaku usaha” (Wawanacara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT UMKM ia melihat bahwa program BLT bagi pelaku UMKM ini sudah sesuai tetapi untuk kebutuhan masyarakat pelaku UMKM. Dalam penambahan modal usaha yang terdampak pandemi Covid-19 masih kurang karena segala kebutuhan masayrakat dengan harga barang yang semakin naik dan meningkat di masa pandemi meskipun dengan adanya program BLT ini tentu masih kurang dan tidak sepenuhnya membantu pelaku UMKM dalam usahanya di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

“Menurut saya dana dari program BLT ini tidak mencukupi kebutuhan untuk modal usaha namun dapat membantu dalam modal usaha bagi masyarakat pelaku UMKM” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani sebagai masyarakat penerima BLT UMKM mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras bagi Ibu Meri Gustiani program BLT untuk pelaku UMKM dari jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk masyarakat pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 tidak mencukupi bagi masyarakat UMKM dalam penambahan modal dan memenuhi kebutuhan tetapi tidak bisa dipungkiri meskipun tidak mencukupi tetapi bisa membantu bagi pelaku usaha sendiri dalam penambahan modal usaha yang sedang dijalankan pada masa sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator Tepat Sasaran dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator kesesuaian program dengan kebutuhan & harapan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwa kesesuaian program BLT dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi kurang sesuai dengan kebutuhan karena dari BLT bagi pelaku UMKM ini masyarakat pelaku usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dapat menambah modal usahanya pada masa masa pandemi. Karena jika dilihat dari 13 responden dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa program BLT bagi pelaku UMKM secara keseluruhan sudah sesuai sebanyak 6 orang responden 4 orang responden masih mengatakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM dan 3 orang responden lainnya mengatakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku UMKM pada saat pandemi.

3. Tepat Waktu

Tepat Waktu, yaitu dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Pada Indikator Tepat Waktu terdapat dua sub indikator yang akan di bahas dalam penerlitan ini yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan

Hasil wawancara mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan yang dilakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Bapak M. Rizki Maulana mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya waktu pelaksanaan untuk pencairan dana BLT ini sudah sesuai dan terlaksana dari waktu yang telah direncanakan oleh Pemerintah sebelumnya”(Wawancara dengan Bapak M.Rizki Maulana pada tanggal 27 mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Rizki Maulana sebagai pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan dilihat dari hasil wawancarakan ia mengatakan bahwa waktu pencairan dana program BLT ini sudah sesuai dan terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Karena selama ia bertugas sebagai pegawai Bank Bri membantu dan

menangani masyarakat dalam pencairan dana BLT tersebut bahwa BLT dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya oleh pihak Pemerintah.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dari pengamatan kami dilapangan memang ada kendala tidak kesesuaian dalam waktu karena mungkin tentu banyak hal yang verifikasi baik di tingkat Desa, Lurah atau tingkat Kabupaten mungkin keterlambatan dalam hal penyampaian laporan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk dari pihak Kecamatan bahwa pencairan dana BLT kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena ada beberapa hal yang kendala dalam dalam penyampaian kepada pihak pemerintah pusat. Karena masih ada hambatan atau kendala yaitu dalam verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang terkait dalam bentuk laporan yang mengakibatkan BLT ini ada ketidak sesuai waktu atau tidak tepat waktu dari waktu pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Suardi yang juga dijadikan sebagai Informan dalam penelitian ini, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan kami dari pihak Desa pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM ini waktu pelaksanaannya masih kurang terlaksana dan kurang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras ia menilai bahwa pencairan dana program BLT bagi pelaku UMKM waktu pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Karena terjadi keterlambatan waktu penyalurkan BLT tersebut sehingga waktu pencairan dana program BLT yang akan diterima para pelaku masyarakat UMKM ada keterlambatan waktu pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidak sesuai dari waktu yang telah ditetapkan dan direncanakan dari pihak Pemerintah terhadap program BLT pada saat pandemi.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah sebagai penerima BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya pencairan dana program BLT ini belum terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah sebagai masyarakat yang menerima BLT UMKM mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan menurut Ibu Nurhaidah bahwa pencairan dana program BLT ini tidak terlaksana dengan waktu yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya. Karena ia sendiri sempat mendapatkan informasi waktu pencairannya tidak sesuai dengan pencairan dana BLT yang Ibu Nurhaidah terima disebabkan ada kesalahan dalam mendapatkan informasi yang diterima pada waktu itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian yaitu masyarakat penerima BLT UMKM dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya pencairan dana BLT ini sudah sesuai dengan waktu yang telah dibuat oleh pihak yang bersangkutan misalnya para pelaku UMKM yang mendaftar mendapatkan informasi bahwa bulan April cair memang di bulan tersebut cair dana ini”.(Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan wawancara dengan Bapak Rian mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, menurut Bapak Rian sebagai masyarakat yang nerima BLT UMKM bahwa pencairan dana ini sesuai dengan waktu yang telah rencanakan oleh pihak yang bersangkutan dalam pencairan dana BLT. Karena pada saat Bapak Rian sendiri mendaftarkan diri sebagai calon penerima BLT bagi pelaku UMKM dan kemudian lolos sebagai penerima BLT pada saat itu serta mendapatkan informasi dan pemberitahuan pada bulan April maka pada bulan tersebut juga Bapak Rian mencairkan BLT tersebut ke pihak Bank BRI terdekat di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga ia merasa bahwa program BLT bagi pelaku UMKM waktu pelaksanaannya sudah sesuai dari waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Febri masyarakat yang memberikan informasi mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya ya sudah sesuailah karena Pemerintah telah menentukan bulan dan tanggal pencairan dana BLT” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Febri sebagai masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwasanya dalam pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM waktu pelaksanaannya memang sudah sesuai dengan

ketentuann yang dibuat oleh Pemerintah. Karena menurut Ibu Febri pihak Pemerintah sudah menentukan dan menjadwalkan bulan tanggal waktu pencairan BLT bagi pelaku UMKM untuk disalurkan sehingga tidak terjadi penundaan dan waktu pelaksanaan pencairan BLT tersebut sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai sebagai berikut:

“Pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM ini yang di Kecamatan Pangkalan Kuras waktu pelaksanaan pencairannya itu sudah sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh Pemerintah”.(Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sepengetahuan Ibu Yanti pencairan dana BLT ini pencairannya sudah terlaksana dan sudah tepat waktu. Karena ketika Ibu Yanti dinyatakan terdaftar sebagai masyarakat pelaku UMKM yang menerima BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan Pemerintah untuk pelaku usaha yang terdampak waktu pencairan dan penyaluran BLT tersebut sudah sesuai dari waktu yang ditetapkan sehuingga BLT ini tepat waktu dalam pencairan dana untuk masyarakat pelaku UMKM.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai yaitu berikut:

“Waktu kapan pencairannya itu kita dapat infomasi jadi ya kita langsung mencairkan dana BLT ini di Bank BRI terdekat menurut saya waktu pencairannya sudah telaksana sesuai atau tidak nya menurut saya sudah sesuai” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras dalam kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sepengetahuan Bapak Abdullah bahwa pencairan dana BLT ini sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Karena ketika Bapak Abdullah terdaftar sebagai penerima BLT tersebut ia mendapatkan notifikasi dari pihak Bank dan mendapatkan informasi kapan waktu pencairannya ini dilakukan di Bank Bri terdekat di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga ia melihat bahwa waktu pencairannya sudah sesuai dengan waktu yang dibuat oleh Pemerintah dan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT sebagai berikut:

“Sejauh ini merunut saya karena saya sudah dua kali menerima BLT bagi pelaku UMKM biasanya selalu tepat waktu memberikan pencairan dana BLT” (Wawancara dengan Ibu Dewi pada tanggal 10 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri terlihat bahwa dalam pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM sudah ada kesesuaian pelaksanaan dari waktu yang telah direncanakan. Karena selama Ibu Dewi Saputri mendapatkan BLT sebanyak dua kali atau dua tahap BLT bagi pelaku UMKM tersebut waktu pencairannya selalu tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan atau notifikasi yang ia terima mengenai BLT tersebut di masa pandemi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Lilis mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya mengenai pencairan dana BLT UMKM ini waktu pencairannya sudah sesuai dari yang direncanakan” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis selaku masyarakat yang menerima BLT UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan bahwa waktu pencairan dana BLT ini memang sudah terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Karena ia selaku masyarakat penerima BLT melihat dan menilai bahwa program BLT yang disalurkan oleh Pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 waktu pencairan dana BLT tersebut sudah sesuai dan terlaksana dari yang direncanakan.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai pencairan dana program BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

“Selama saya menerima BLT UMKM ini pencairan dananya sudah sesuai dan selalu tepat waktu” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan terlihat bahwa selama Ibu Siti menerima dan mencairkan dana BLT selalu sesuai dengan waktu pelaksanaannya pencairan dengan tepat waktu. Hal ini disebabkan selama Ibu Siti menerima BLT yang disalurkan oleh Pemerintah pada masa pandemi waktu pencairannya sudah terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta tidak ada penundaan

atau kesalahan dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak Pemerintah yang disalurkan melalui Bank Bri atas instruksi Pemerintah sendiri.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sudah sesuai dengan pelaksanaan pencairan yang telah ditentukan oleh Pemerintah tetapi ada beberapa masyarakat tidak langsung mencairkan dana tersebut dari waktu yang sudah ditentukan oleh Pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati sebagai masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras terlihat bahwa pelaksanaan pencairan dana BLT sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan waktu yang pemerintah tentukan meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak mencairkan dana di waktu yang ditentukan. Karena masih ada masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM menyatakan bahwa BLT tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh pihak Pemerintah ini disebabkan pihak penerima atau masyarakat yang menjadi penerima tidak melihat notifikasi atau tidak tahu bahwa menerima BLT sehingga ada ketidak sesuai waktu dalam pencairan BLT tersebut.

Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk pencairan dana BLT ini sendiri sejauh ini sudah tepat waktu sesuai dengan arahan Pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani mengenai kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan terlihat bahwa sejauh ia ketahui pencairan dana BLT ini sudah sesuai dengan waktu pelaksanaannya dan sudah tepat waktu sesuai dengan adanya arahan oleh Pemerintah. Karena sebagian masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM melihat bahwa kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM pencairan dananya sudah sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh pihak Pemerintah serta sesuai dari informasi yang didapatkan sebelumnya mengenai waktu penyaluran dan pencairan BLT yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator Tepat waktu maka dapat disimpulkan pada sub indikator kesesuaian waktu pelaksanaan dengan dengan rencana yang telah ditetapkan waktu pencairan dana BLT sudah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan oleh pihak Pemerintah dikatakan Cukup Efektif. Karena sebanyak 13 responden dalam penelitian ini 10 responden mengatakan bahwa pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM waktu pelaksanaannya sudah tepat waktu dan terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 1 orang mengatakan waktu pelaksanaan pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM masih kurang sesuai dengan waktu pelaksanaannya yang telah direncanakan sebelumnya 2 responden berpendapat pencairan dana BLT bagi pelaku UMKM waktu pelaksanaannya tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi

Hasil wawancara mengenai Hasil wawancara mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi

Melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut

Hasil wawancara dengan pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Bapak M. Rizki Maulana mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM disalurkan oleh Pemerintah di masa pandemi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tahap program BLT yang baru disalurkan atau di cairkan pada saat ini ada dua tahap tetapi sepertinya bakalan masuk tahap ke tiga cuma kita sebagai pihak penyalurnya itu belum tahu pasti tahap ketiganya kapan karena yang kami dengar tahap ketiga masih dalam proses dan kabarnya juga segera di cairkan untuk masyarakat pelaku UMKM” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri Bapak M. Rizki Maulana di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwasanya program BLT bagi pelaku UMKM akan disalurkan dalam tiga tahap untuk saat ini program BLT baru disalurkan dalam dua tahap, tahap ketiganya masih dalam proses dan segera di salurkan untuk masyarakat pelaku UMKM. Karena selama ia bekerja sebagai pegawai Bank Bri yang ikut serta membantu masyarakat pelaku UMKM yang menerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah baru berjalan dan diterima masyarakat sebanyak dua tahap penyakuran dan ia juga mendapatkan informasi bahwa ada tahap ketiga program

BLT yang akan disalurkan oleh Pemerintah mengenai kepastiaan tahap ketiga juga belum bisa dipastikan karena masih dalam proses penyaluran.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh pemerintah di masa pandemi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sepengetahuan kami karena memang tidak masuk ke kami laporan jumlah berapa tahap masyarakat menerima sepengetahuan kami dari program Pemerintah itu sekitar tiga tahap penerimaan atau bantuan yang disalurkan ke rekening penerima bantuan bagi pelaku usaha tersebut” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk selaku Informan dari pihak Kecamatan mengenai tahap BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan Pemerintah bisa dilihat dari jawaban Bapak Jorhan A.Mk yaitu adalah sebanyak tiga (3) tahap bantuan langsung tunai ini disalurkan untuk para pelaku usaha. Karena sepengetahuan dari pihak Kecamatan Pangkalan Kuras program BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Pemerintah sudah dilakukan tiga tahap penyaluran dimana penyaluran tersebut diberikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yang usahanya terdampak pandemi dan disalurkan di rekening setiap masyarakat yang menerima BLT.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu Sekdes yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai informan mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan saya yang sudah disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM itu sebanyak dua tahap dan katanya Pemerintah akan segera menyalurkan tahap ketiga untuk pelaku UMKM pada masa pandemi” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi selaku Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras program BLT bagi pelaku UMKM baru di salurkan sebanyak dua tahap dan menurut informasi yang ia terima bahwa Pemerintah akan menyalurkan tahap ketiga untuk pelaku UMKM. Karena masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras baru menerima tahap satu dan tahap kedua untuk tahap ketiga sendiri masyarakat pelaku UMKM belum ada yang menerima BLT tersebut menurut sepengetahuan Bapak Suardi selama ini hanya dua tahap yang untuk informasi tahap ketiga akan disalurkan tetapi belum bisa dipastikan kapan akan disalurkan untuk masyarakat pelaku UMKM oleh Pemerintah.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah selaku masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi, dengan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“yang saya ketahui program BLT ini di salurkan sebanyak tiga tahap dimana di setiap tahapnya dengan jumlah nominal yang berbeda dan saya sendiri mendapatkan BLT ini pada tahap kedua pencairan” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM yaitu Bapak Rian sebagai berikut:

“Sejauh ini yang saya ketahui ada tiga tahapan BLT ini disalurkan kepada pelaku usaha saya mendapatkan BLT pada tahap penyaluran pertama dengan jumlah Dua juta empat ratus ribu rupiah pada waktu itu” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Febri mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM disalurkan oleh pemerintah, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah menyalurkan dana BLT sebanyak tiga tahap untuk pelaku usaha dengan maksud bisa untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha dalam penambahan modal kebetulan waktu itu saya mendapatkan dua tahap yaitu pada tahap pertama dan tahap kedua pencairan” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai berikut:

“Yang saya ketahui dua tahap karena tahap pertama saya terdaftar sebagai pelaku usaha yang menerima BLT tetapi waktu itu saya tidak tahu cara cek saya nerima atau tidak saya biarkan ternyata saya menerima ketika saya ingin melakukan pencairan ternyata tidak bisa lagi disebabkan sudah terlewat dari batas waktu yang ditentukan kemudian saya mendapatkan lagi di tahap kedua untuk tahap ketiganya ada atau tidak nya saya kurang tahu karna saya tidak mendapatkan informasi mengenai itu” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu sebagai berikut:

“Mengenai berapa tahap bantuan ini informasi yang saya dapatkan hanya dua tahap saja yang disalurkan oleh pemerintah” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri sebagai masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai tahap BLT ini disalurkan yaitu sebagai berikut:

“Kalau sepengetahuan saya ada dua tahap yang disalurkan untuk pelaku usaha saya dapat yang tahap kedua dengan jumlah uang senilai satu jutah dua ratus ribu rupiah” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Dan hasil wawancara dengan Ibu Lilis masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM dengan hasil wawancara yaitu:

“Ada dua tahap program ini disalurkan tetapi Ibu mendapatkan hanya di tahap kedua saja”(Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai masyarakat yang menerima bantuan yaitu sebagai berikut:

“Yang saya ketahui ada tiga tahap pencairan dana BLT yang salurkan oleh pihak Pemerintah untuk pelaku usaha baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintahan daerah”(Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengetahuan saya ada tiga tahap di masa pandemi yang disalurkan dimana setiap tahap pencairan memiliki jumlah bantuan yang berdeba pada tahap pertama dua juta empat ratus ribu rupiah tahap kedua dan tahap ketiga satu juta dua ratus ribu rupiah”(Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Meri gustiani mengenai tahap program BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah di masa pandemi dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang saya tahu program BLT ini dibagikan dalam tiga tahap yang tahap pertama Dua juta empat ratus dan tahap kedua serta tahap ketiga yaitu satu juta dua ratus”(Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai berapa tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi adalah sebanyak tiga (3) tahap yang disalurkan

oleh Pemerintah di masa pandemi untuk para pelaku usaha baik di Pemerintah pusat daerah serta kabupaten dengan masing-masing tahap pencairan yang di salurkan memiliki jumlah nominal berbeda yaitu pada tahap pertama berjumlah dua juta empat ratus ribu rupiah serta tahap kedua dan ketiga berjumlah satu juta dua ratus ribu rupiah.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kurasa sebanyak 10 orang masyarakat yang menerima yang dijadikan responden dalam penelitian ini 4 orang responden mengatakan bahwa BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh Pemerintah sebanyak dua tahap di masa pandemi yang disalurkan oleh pemerintah dan 6 orang masyarakat yang menjadi responden mengatakan ada tiga tahap yang Pemerintah salurkan untuk masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi di Kecamatan Pangkalan Kurasa akan tetapi setiap masyarakat yang dijadikan responden ada yang menerima hanya di tahap satu ada yang menerima di tahap kedua dan ada juga masyarakat menerima di tahap satu dan tahap kedua dalam program BLT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator tepat waktu maka dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator tahap program BLT bagi pelaku UMKM di salurkan oleh Pemerintah di masa pandemi melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang dijadikan *Key Informan* dan informan bahwa Pemerintahan menyalurkan tiga tahap dalam penyaluran BLT bagi pelaku UMKM tetapi tidak semua masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Pangkalan Kurasa mendapatkan ketiga

tahap yang disalurkan karena dalam ketiga tahap penyaluran dana BLT bagi pelaku UMKM menurut hasil wawancara masyarakat hanya menerima tahap pertama ada juga masyarakat yang menerima hanya di tahap kedua bahkan ada juga yang menerima BLT ini di tahap satu dan tahap kedua untuk tahap ketiga responden dalam penelitian ini belum mendapatkan BLT tersebut yang telah dibuat oleh Pemerintah.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan, yaitu dilihat melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.

Pada Indikator Tercapainya Tujuan terdapat dua sub indikator yang akan di bahas dalam penerlitan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras

Hasil wawancara mengenai Hasil wawancara mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan kuras Melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Bapak M. Rizki Maulana sebagai *Key Informan* dalam penelitian mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah

ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya kegiatan program BLT ini dengan jumlah nominal yang diberikan Pemerintah sudah cukup bisa dikatakan membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal usahanya pada saat ini” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak M. Rizki Maulana kegiatan program BLT dengan nominal yang diberikan Pemerintah sudah cukup bisa dikatakan membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal usaha yang masyarakat miliki pada masa pandemi. Karena dengan jumlah yang diterima masyarakat pelaku UMKM untuk penambahan modal usahanya yang terdampak pandemi Covid-19 maka sudah bisa membantu dalam penambahan modal yang diperlukan oleh masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga tujuan dari program BLT yang disalurkan oleh Pemerintah untuk masyarakat sudah bisa dikatakan tercapai dengan semestinya.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Sudah, sudah sangat membantu masyarakat pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bidang usaha sudah sangat membantu sekali dengan program BLT ini terutama dalam penambahan modal usaha yang mereka miliki” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan yaitu Bapak Jorhan A.Mk bisa dilihat bahwa adanya program BLT ini sudah bisa dikatakan membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal usaha yang mereka miliki terutama bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Karena banyak pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang menjelajahi dunia hingga berdampak begitu besar terutama bagi masyarakat pelaku UMKM dengan adanya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bentuk program BLT untuk membantu pelaku UMKM dalam penambahan modal maka BLT sangat terbantu dalam membangkitkan usaha masyarakat pada saat ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Sekdes Bapak Suardi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut sepengamatan kami dari pihak Desa bahwa belum bisa dikatakan membantu masyarakat pelaku UMKM sepenuhnya dalam penambahan modal yang mereka butuhkan di masa pandemi” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi sebagai Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tercapainya tujuan dalam penambahan modal usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras pada masa pandemi, ia menagatkan bahwa kegiatan program BLT belum sepenuhnya dikatakan membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal usaha yang dibutuhkan pada masa pandemi. Karena masyarakat yang terdampak usahanya di tengah pandemi membutuhkan dana

yang cukup besar dalam penamabahan modal jadi, dengan BLT yang diterima belum bisa dikatakan membantu sepenuhnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah selaku masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan kuras yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak sepenuhnya membantu kalau bicara bisa dikatakan membantu atau tidaknya pasti sudah bisa dikatakan membantu bagi para pelaku usaha yang ada di Kecamatan ini dalam penambahan modal untuk usaha yang sedang dijalankan di masa pandemi” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras ini bisa dikatakan membantu tentu bisa dikatakan membantu bagi para pelaku usaha dalam penambahan modal yang mereka miliki di masa pandemi ini yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras hanya saja BLT yang Ibu Nurhaidah terima tidak sepenuhnya mencukupi dan membantu dalam penambahan modal usaha yang dijalankan pada masa pandemi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

“Kegiatan Program BLT bagi pelaku UMKM yang di buat Pemerintah pada masa pandemi ini tentu membantu bagi kami para pelaku usaha tetapi tidak sepenuhnya” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Rian masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang termasuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi serta menerima BLT dilihat bahwa kegiatan program BLT ini bisa dikatakan membantu

para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras meskipun tidak membantu sepenuhnya bagi masyarakat. Karena jumlah yang masyarakat terima dan penambahan modal untuk usaha yang masyarakat miliki pada saat ini belum sepenuhnya tercukupi sehingga tujuan dari program ini cukup tercapai.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Febri yang menerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau dibilang membantu ya membantu kalau bicara soal mencukupi belum tercukupi tetapi dari tidak ada sama sekali ya bisalah digunakan untuk usaha” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku penerima BLT bagi pelaku UMKM ia merasakan bahwa program BLT bisa dibilang membantu untuk penambahan modal bagi para usaha tetapi tidak mencukupi sepenuhnya bagi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada masa sekarang. Karena pada masa pandemi yang membawa dampak yang kurang baik bagi pelaku usaha tentu membutuhkan dana bantuan yang cukup besar untuk menyelamatkan usaha di tengah pandemi sehingga BLT yang diterima masyarakat dari Pemerintah bisa dikatakan membantu tetapi belum sepenuhnya mencukupi bagi pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

“Yang saya rasakan sebagai penerima bantuan ini kurang lebihnya sebenarnya membantu tetapi tidak sepenuhnya” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu yang Ibu Yanti rasakan sendiri dari kegiatan program BLT ini adalah bahwa kurang lebihnya bisa dikatakan membantu Ibu Yanti sebagai pelaku usaha dan masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi tetapi tidak sepenuhnya membantu dalam penambahan modal usaha karena nominal yang diterima tidak mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan pada saat ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mendapatkan BLT dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya sendiri adanya kegiatan program BLT ini sangat sangat membantu saya dalam usaha mungkin kalau tidak ada bantuan ini pada masa pandemi saat ini mungkin putaran usaha itu tidak ada perkembangannya” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras dilihat dari hasil wawancara bahwa Bapak Abdullah merasakan kegiatan BLT yang disalurkan oleh Pemerintah untuk penambahan modal pada masa pandemi ini sangat membantu. Karena ia selaku masyarakat penerima merasakan dengan adanya BLT bagi pelaku UMKM dari Pemerintah dalam penambahan modal untuk pelaku usaha ia yang memiliki usaha pada masa pandemi yang terdampak pandemi sangat merasa terbantu jika tidak

ada program BLT ini ia merasa usaha yang dimiliki pada masa pandemi ini mungkin saja tidak berkembang dan berjalan hingga saat ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri sebagai masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sangat membantu meskipun belum terlalu mencukupi kebutuhan masyarakat yang memiliki usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras pada saat ini” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri yang merasakan kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM bahwasanya dengan program ini sudah bisa dikatakan sangat membantu masyarakat yang memiliki usaha di masa pandemi ini meskipun dengan BLT ini tidak sepenuhnya mencukupi bagi para pelaku usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena dengan adanya BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh pemerintah di masa pandemi tentu membantu pelaku usaha untuk penambahan modal usaha dengan jumlah yang diberikan untuk masyarakat sudah bisa dikatakan membantu bagi para pelaku usaha.

Dan hasil wawancara dengan Ibu Lilis sebagai penerima BLT mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Sudah membantu tetapi tidak sepenuhnya membantu dalam penambahan modal usaha yang dijalankan pada masa pandemi Covid-19 pada saat ini” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bahwa kegiatan

program BLT menurut tujuannya sudah tercapai untuk membantu bagi pelaku UMKM tetapi tidak sepenuhnya BLT ini membantu dalam penambahan modal bagi masyarakat yang memiliki usaha di kecamatan pangkalan Kuras. Karena bisa dilihat jika bicara mengenai kebutuhan yang diperlukan masyarakat akan tetap merasa kurang dari BLT yang diberikan tetapi dengan BLT ini juga bisa dikatakan membantu masyarakat yang sedang membutuhkan masukan untuk penambahan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti sebagai penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sudah sangat membantu karena anggarannya untuk setiap penerima BLT ini cukup besar sehingga tujuan dari program BLT ini menurut saya sudah tercapai” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras bahwasanya kegiatan ini sudah tercapai tujuannya karena sudah sangat membantu bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan jumlah anggaran yang di dapat setiap pelaku UMKM yang menerima cukup besar dalam penambahan modal usaha yang dijalankan pada masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Maya Lesmawati masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya masih belum bisa dikatakan membantu sepenuhnya dalam penambahan modal usaha karena jumlah dana yang didapatkan bagi pelaku usaha masih minim”(Wawancara dengan Ibu Maya Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Maya Lesmawati yang termasuk masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras ia merasakan bahwa kegiatan program BLT ini belum bisa dikatakan membantu bagi masyarakat pelaku UMKM untuk penambahan modal disebabkan jumlah dana yang diterima pelaku UMKM masih jumlah yang sedikit atau minim sehingga tujuan dari program ini belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya program BLT ini cukup membantu dalam penambahan modal usaha untuk masyarakat karena bagaimana yang kita tahu saat masa pandemi ini mematikan usaha sebagian besar masyarakat jadi program BLT ini cukup membantu”(Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani dilihat bahwa kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi ini cukup membantu para masyarakat yang memiliki usaha yang sempat mengalami keterpurukan sehingga BLT ini berguna untuk penambahan modal bagi usaha-usaha yang masyarakat miliki. Karena ia melihat bahwa usaha yang masyarakat miliki pada masa

pandemi mematikan usaha sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan adanya BLT tersebut cukup membantu para pelaku usaha dalam penambahan modal untuk usaha yang masyarakat miliki

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang memiliki dan manerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi mengenai tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan program BLT sudah cukup membantu bagi pelaku UMKM pada masa pandemi meskipun belum sepenuhnya tercukupi dengan BLT ini. Karena sebageian masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi merasakan bahwa BLT ini sudah cukup membantu usahanya dalam penambahan modal usahanya meskipun tidak mencukupi sepenuhnya jika dilihat dari nominal yang masyarakat terima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator tercapainya tujuan maka dapat disimpulkan pada sub indikator tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM yang telah ditentukan oleh Pemerintah di Kecamatan Pangkalan Kuras tujuannya cukup tercapai. Karena menurut hasil wawancara bahwa BLT bagi pelaku UMKM sudah bisa membantu masyarakat yang memiliki usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penambahan modal serta membangkitkan usaha yang masyarakat miliki akibat terdampak pandemi Covid-19 meskipun dengan nominal BLT bagi pelaku

UMKM yang disalurkan pemerintah belum sepenuhnya masyarakat merasa tercukupi untuk usaha yang sedang dijalankan pada saat ini.

- b. Adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal

Hasil wawancara mengenai Adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal dengan melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak M. Rizki Maulana mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk pengawasan terhadap program BLT ini di Kecamatan pangkalan Kuras kita sebagai pihak penyalur kita kurang tahu ya berapa kali dilakukan pengawasannya karena ini Pemerintah yang membuat program bantuannya dan kita hanya sebagai pihak penyalurnya saja” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal ia sebagai pihak penyalur bantuan kurang tahu berapa kali dilakukan pengawasan terhadap program BLT ini di Kecamatan Pangkalan Kuras dikarenakan program BLT ini dibuat oleh pihak Pemerintah sedangkan Bapak M. Rizki Maulana hanya pihak penyalur dari Bank

Bri sehingga pengawasan yang dilakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras setiap tahapnya ia kurang mengetahuinya.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan sesuai dengan tahap pencairan yang dilakukan terhadap usaha UMKM yang terdaftar di Kecamatan Pangkalan Kuras” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk terhadap . adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal yaitu selalu ada dilakukan pengawasan oleh pihak Kecamatan sesuai dengan tahap-tahap pencarian BLT yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena disetiap tahap penyaluran BLT bagi pelaku UMKM untuk masyarakat penerima dilakukan pengawasan terhadap program BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras agar tercapainya tujuan dari program BLT tersebut dari pemerintah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu Sekdes Bapak Suardi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau soal berapa kali dilakukan pengawasan setiap tahapnya terhadap program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras saya sendiri kurang tahu berapa kalinya dilakukan” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras BapK Suardi mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal bahwa ia sebagai Sekdes juga kurang tahu berapa kali dilakukan pengawasan terhadap program BLT ini setiap tahapannya. Karena di tempat ia bertugas sebagai Sekdes masyarakat setempat tidak banyak yang menerima BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan ditengah pandemi sehingga pengawasan terhadap program BLT pada saat ini ia kurang mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal, yaitu sebagai berikut:

“Kalau bicara berapa kali dilakukan pengawasan terhadap program BLT di Kecamatan ini saya kurang tahu juga dikarenakan saya hanya masyarakat penerima BLT” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Rian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai pelaku Usaha yang menerima BLT, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya kurang tahu juga mengenai berapa kalinya dilakukan pengawasan terhadap program BLT ini di Kecamatan Pangkalan Kuras” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Febri selaku masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:

“Kalau soal itu kami masyarakat penerima BLT kurang tahu juga ya karena kami hanya mencairkan ketika ada pemberitahuan sehingga

mengenai pengawasan yang dilakukan kami kurang tahu”(Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yanti sebagai masyarakat yang menerima BLT di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

“Saya kurang tahu berapa kali dilakukan pengawasannya dalam kegiatan program ini mungkin ada pengawasan yang dilakukan tetapi belum maksimal”(Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah yaitu sebagai berikut:

“Bicara soal pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan program ini berapa kalinya saya tidak tahu juga karena itu pihak Pemerintah yang melakukan di Kecamatan tetapi sepertinya setiap tahap pencairan pasti ada pengawasan yang dilakukan”(Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri yaitu masyarakat yang mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri tidak mengetahui soal pengawasan ini soalnya saya hanya penerima BLT” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis penerima BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi yaitu sebagai berikut:

“Kalau mengenai pengawasan terhadap program BLT ini kurang tahu juga berapa kali dilakukannya di Kecamatan Pangkalan Kuras”(Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Berapa kali pengawasan dilakukan setiap tahapnya saya sendiri kurang tahu karena saya hanya penerima bantuan mengenai pengawasan sama sekali saya tidak tahu” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Kalau soal pengawasan yang dilakukan terhadap program ini di Kecamatan Pangkalan Kuras saya kurang tahu karena saya hanya masyarakat yang nerima bantuan” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustian yaitu sebagai berikut:

“Saya sendiri tidak tahu ya untuk pengawasan berapa kali dilakukannya dari pemerintah sendiri tetapi yang saya lihat untuk pengawasan terhadap program BLT ini sendiri masih kurang efektifnya dilakukan karena ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai UMKM namun mendapatkan BLT tersebut” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang menerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal bahwasanya masyarakat yang menerima BLT ini kurang tahu bahkan tidak tahu berapa kali dilakukan pengawasan setiap tahapnya di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Pengawasan terhadap program BLT bagi pelaku UMKM tentu dilakukan di setiap tahapnya dalam pencairan BLT tetapi hanya saja pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri masih kurang efektif dilakukan karena

masih banyak kekeliruan yang dilakukan dalam pemberian BLT ini terutama bagi pelaku UMKM sendiri bisa dilihat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menerima BLT ini tetapi tidak memiliki usaha justru masyarakat yang memiliki usaha tidak mendapatkan BLT sehingga kurang tercapainya tujuan program BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan mengenai indikator Tercapainya Tujuan dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator adanya pengawasan terhadap program agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal Kurang Efektif. Karena dalam penerima BLT ini tentu ada pengawasan yang dilakukan sementara pengawasan yang dilakukan dalam program BLT bagi pelaku UMKM masih kurang terutama yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan disebabkan menurut hasil wawancara dengan responden dalam penelitian ini bahwa responden atau masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM kurang bahkan tidak tahu berapa kali dilakukan pengawasan oleh Pemerintah setiap tahapnya terhadap BLT ini pada masa pandemi.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata, yaitu dilihat melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahannya bagi masyarakat ditempat.

Pada Indikator Perubahan Nyata terdapat dua sub indikator yang akan di bahas dalam penerlitan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM

Hasil wawancara mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM. Melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak M. Rizki Maulana sebagai *Key Informan* dalam penelitian ini, dengan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

“Baik menurut saya untuk program ini sudah sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi karena di masa pandemi itu semua orang ikut terdampak termasuk kegiatan usaha juga salah satunya ikut terdampak dan membutuhkan modal untuk usahanya jadi dengan adanya program BLT ini ya menurut saya sangat membantu terhadap pemulihan ekonomi dan memulihkan usaha yang masyarakat miliki”(Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak M. Rizki Maulana mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM dengan adanya kegiatan program BLT ini pada masa pandemi ia melihat bahwa program BLT ini sangat memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi. Karena dengan BLT tersebut bisa dijadikan penambahan modal untuk memulihkan usaha yang masyarakat miliki yang terdampak pandemi saat ini

sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali pulih di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan saat ini.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Kegiatan program BLT yang dibuat oleh Pemerintah itu sangat sangat membantu terhadap pemulihan ekonomi usaha UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras pada masa Covid-19 dengan adanya BLT tersebut dapat membantu kebutuhan pokok serta memulihkan ekonomi para pelaku UMKM yang masyarakat miliki sehingga usaha tersebut bisa pulih kembali” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk selaku kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini bahwa dengan adanya kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi ini sangat memberi pengaruh yang bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat serta dapat memulihkan usaha para pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena dengan program BLT yang diberikan Pemerintah dapat membantu kebutuhan pokok serta memulihkan ekonomi para pelaku UMKM yang masyarakat miliki sehingga ekonomi dan usaha masyarakat terbantu pada saat pandemi.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu

pemulihan ekonomi masyarakat UMKM, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya BLT ini cukup memberi pengaruh terhadap pemulihan masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras selain dalam pemulihan juga cukup membantu untuk usaha yang masyarakat miliki pada masa pandemi” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 15 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi sebagai Sekdes yang dijadikan informan bahwa ia mengatakan BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi ini cukup memberi pengaruh terhadap pemulihan dan cukup membantu usaha masyarakat di masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena kegiatan program BLT yang salurkan Pemerintah pada saat pandemi untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 cukup membantu dan memulihkan perekonomian masyarakat dan usaha pada saat ini di Kecamatan Pangkalan Kuras sehingga perekonomian yang sempat memburuk mulai membaik dengan adanya program BLT bagi pelaku UMKM pada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang saya rasakan dengan adanya program BLT bagi pelaku UMKM ini tentu memberi pengaruh kepada masyarakat yang memiliki usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan program ini dapat memulihkan ekonomi serta penambahan modal bagi masyarakat yg memiliki usaha” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah yang mendapatkan BLT pada masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras ia merasakan bahwa dengan kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM ini memberi pengaruh selain untuk

memulihkan ekonomi bagi masyarakat juga menambah modal bagi usaha-usaha yang mereka miliki pada saat ini. Karena masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tentu masyarakat membutuhkan bantuan agar bisa memulihkan perekonomian masyarakat serta dapat membantu penambahan modal usaha yang sedang dijalankan sehingga dengan BLT yang disalurkan oleh pemerintah usaha yang masyarakat miliki di Kecamatan Pangkalan Kuras tersebut bisa bangkit dan berjalan seperti biasanya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rian yang termasuk penerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sendiri kurang berpengaruh dalam pemulihan ekonomi bagi masyarakat UMKM dikarenakan jumlah dana yang diterima belum sepenuhnya membantu masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rian selaku masyarakat yang memiliki usaha yang menerima BLT mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM bahwa ia mengatakan kegiatan program BLT ini kurang memberi pengaruh kepada masyarakat pelaku UMKM pada masa sekarang dikarenakan jumlah bantuan yang diterima masyarakat belum bisa dikatakan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini sehingga untuk pemulihan ekonomi pada masyarakat masih kurang terbantu dengan BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras pada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT bagi pelaku UMKM dimasa pandemi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya setidaknya kegiatan ini memberi pengaruh dalam pemulihan ekonomi apalagi pada masa pandemi ini modal semakin menipis dengan adanya BLT ini dapat dijadikan penambahan modal bagi usaha saya saat ini” (Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Febri yang menerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM bahwasanya ia merasakan bahwa dengan adanya BLT ini memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi dengan BLT ini juga bisa menambah modal bagi usaha yang ia jalankan pada masa pandemi saat ini. Karena pada saat pandemi Covid-19 yang memberi dampak kepada masyarakat pelaku UMKM termasuk Ibu Febri sebagai pelaku usaha pada masa pandemi modal usaha yang ia miliki semakin menipis disebabkan pemasukan kurang tidak seperti biasanya dengan adanya BLT tersebut bisa membantu ia dalam memulihkan ekonomi serta penambahan modal bagi usaha yang ia jalankan pada saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yaitu sebagai berikut:

“Dengan adanya program BLT ini tentu membantu bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan BLT ini juga ekonomi setidaknya bisa pulih dari terdampak pandemi Covid-19 pada saat ini pengaruh lainnya yang saya rasakan itu ya bisa dijadikan penambahan modal usaha saya pada saat pandemi ini” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM bahwa dengan adanya program BLT ini

bisa membantu pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena BLT tersebut cukup membantu dalam pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terampak Covid-19 di Kecamatan Pangkalan Kuras seperti penambahan modal usaha yang ia miliki pada masa pandemi saat ini sehingga dengan BLT ini bisa membangkitkan perekonomian dan usaha yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya sangat membantu dalam perekonomian ya karena selama pandemi ini ekonomi masyarakat kurang baik pada masa pandemi dengan adanya BLT ekonomi masyarakat terbantu serta bisa untuk penambahan modal usaha yang terdampak sehingga usaha yang dimiliki masyarakat bisa berjalan lagi” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdullah masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM dilihat dari hasil wawancara menurut Bapak Abdullah bahwa dengan adanya kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi ini sangat memberi pengaruh terhadap ekonomi masyarakat yang sempat kurang baik pada saat pandemi. Karena selain memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi dengan BLT ini juga bisa dijadikan penambahan modal bagi usaha serta usaha yang masyarakat miliki bisa berjalan seperti biasanya di Kecamatan Pangkalan Kuras pada masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri sebagai penerima BLT bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sendiri ya dengan adanya kegiatan BLT ini cukup memberi pengaruh karena bisa memulihkan ekonomi masyarakat apa lagi bagi yang memiliki usaha yang kekurangan modal pada masa pandemi tentu bisa BLT ini dijadikan modal usaha bagi masyarakat pelaku UMKM itu sendiri” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM terlihat bahwa ia merasakan sendiri dengan kegiatan BLT ini cukup memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena BLT yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 BLT ini bisa masyarakat jadikan modal atau penambahan modal usaha bagi pelaku UMKM yang sempat kekurangan modal pada masa pandemi Covid-19 sehingga usaha yang dijalankan masyarakat bisa berjalan dan perekonomian mulai membaik dengan BLT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis yaitu masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kegiatan program BLT ini tentu memberi pengaruh dalam memulihkan ekonomi terutama bagi masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lilis masyarakat yang menerima BLT bahwa dengan adanya kegiatan program BLT ini memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena di masa pandemi Covid-19 masyarakat membutuhkan bantuan dalam pemulihan ekonomi dan untuk usaha

dengan adanya bantuan dalam bentuk BLT yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi BLT ini tentu memberi pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat yang membutuhkan dalam pemulihan ekonomi dan usaha di Kecamatan Pangkalan Kuras pada saat pandemi ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti sebagai masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM pada masa pandemi, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya kegiatan program BLT ini memberi pengaruh kepada pemulihan ekonomi pada masa pandemi bagaimana bisa dilihat dengan BLT ini juga para pelaku usaha bisa menambah modal agar usaha pada saat ini bisa berkembang” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM bahwasanya ia melihat kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM ini dapat memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Karena dengan BLT ini para pelaku UMKM dapat digunakan dalam menambah modal usaha masyarakat sehingga usaha masyarakat bisa berkembang yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras serta perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi juga bisa membaik kembali.

Hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati sebagai penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM , dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bantuan ini sudah memberikan pengaruh yang baik terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras karena dari bantuan ini bisa memudahkan masyarakat dalam penambahan modal

usaha” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati masyarakat yang menerima BLT bagi Pelaku UMKM bahwasanya bantuan ini sudah memberi pengaruh yang baik dalam pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Karena BLT bagi pelaku UMKM yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sudah bisa membantu dan memudahkan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan penambahan modal usaha yang dimiliki masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras dimana perekonomian dan usaha yang dijalankan pada masa pandemi mengalami keterpurukan yang cukup signifikan bagi masyarakat pelaku UMKM sendiri.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani yaitu sebagai berikut:

“Nah untuk program BLT ini sendiri cukup memberikan pengaruh terhadap pemulihan ekonomi bagi masyarakat karena dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi masyarakat yang memiliki UMKM tersebut” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM ia menyebutkan bahwa kegiatan program BLT memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi masyarakat dan BLT ini dan dijadikan sebagai modal usaha yang dimiliki pada saat ini. Karena yang sempat diketahui bahwa perekonomian masyarakat pada saat pandemi juga mengalami perubahan yang kurang baik bagi masyarakat yang terdampak pandemi, jadi

dengan disalurkan BLT tersebut bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dengan BLT ini juga memberi pengaruh yang cukup baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator perubahan nyata maka dapat disimpulkan pada sub indikator Program BLT bagi pelaku UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat UMKM sudah cukup membantu dan memberi pengaruh terhadap pemulihan ekonomi bagi masyarakat di kecamatan Pangkalan Kuras pada saat pandemi, karena dengan BLT ini sudah dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan serta BLT ini juga dapat membantu masyarakat pelaku UMKM dalam penambahan modal untuk usaha yang sedang masayarkat jalankan pada saat sekarang ini sehingga BLT ini juga memberi pengaruh yang cukup baik bagi masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Pangkalan Kuras.

b. Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras

Hasil wawancara mengenai Hasil wawancara mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Melakukan wawancara dengan Pegawai Bank BRI dan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras serta masyarakat yang terlibat atau menerima BLT bagi pelaku UMKM sebagai berikut:

Hasil wawanca penerimara dengan Pegawai Bank Bri di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak M. Rizki Maulana, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya sebagai pihak penyalur program BLT belum bisa merasakan karena saya juga tidak mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM ini tetapi menurut saya masyarakat yang memiliki usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan BLT tentu merasakan manfaat dari program ini untuk usahanya” (Wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana pada tanggal 27 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Rizki Maulana sebagai pegawai Bank BRI di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras ia sendiri sebagai pegawai Bank BRI yang menyalurkan program BLT bagi pelaku UMKM untuk masyarakat belum bisa merasakan manfaat yang didapat karena ia tidak menerima BLT tersebut sehingga tidak bisa merasakan dari BLT yang dibuat pemerintah pada saat ini tetapi untuk masyarakat pelaku UMKM tentu dapat merasakan manfaat dari program BLT yang di dapatkan seperti pulihnya ekonomi dan usaha yang dimiliki masyarakat yang terdampak pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras pada saat ini.

Hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Mayarakat Desa Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sangat dapat merasakan karena kita melihat masyarakat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang terdampak pandemi Covid-19 dengan adanya bantuan ini sehingga masyarakat bisa memperbaiki usahanya serta bisa membantu dalam kehidupan rumah

tangganya” (Wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk pada tanggal 6 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jorhan A.Mk selaku kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan bahwasanya ia sendiri bisa merasakan manfaat dari dari program BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras meskipun ia tidak menerima BLT tersebut karena ia melihat masyarakat yang menerima BLT yang memiliki usaha dapat merasakan manfaat dari BLT yang disalurkan oleh Pemerintah dengan memperbaiki usaha dan perekonomian masyarakat yang sempat kurang baik akibat terdampak pandemi Covid-19 bisa membaik kembali seeperti yang diharapkan Pemerintah dan masyarakat yang menerima bantuan.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu Sekdes Bapak Suardi yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai apakah dapat merasakan manfaat dari program BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk saya sendiri saya tidak bisa merasakan manfaat dari program BLT bagi pelaku UMKM karena saya tidak merima bantuan ini jadi saya kurang tahu manfaat yang dirasakan tetapi kalau menurut saya bagi masyarakat UMKM yang mendapatkan BLT ini tentu mereka bisa merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi saat ini” (Wawancara dengan Bapak Suardi pada tanggal 31 Mei 2022).

Dari hasil wawancara dengan Sekdes di Kecamatan Pangkalan Kuras Bapak Suardi dilihat dari jawaban wawancara ia sendiri tidak bisa merasakan manfaat dari program BLT ini dikarenakan Bapak Suardi tidak menerima atau mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat oleh Pemerintah akan tetapi untuk masyarakat pelaku UMKM yang menerima BLT ini tentu bisa merasakan

manfaat dari BLT yang diberikan pemerintah salah satunya dalam segi pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini.

Bersarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya selaku penerima BLT bagi pelaku UMKM tentu merasakan manfaat dari program ini salah satunya dengan adanya BLT ini modal saya terbantu sehingga usaha saya kembali membaik dari sebelumnya” (Wawancara dengan Ibu Nurhaidah pada tanggal 12 Maret 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhaidah selaku penerima BLT bagi pelaku UMKM di kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras ia selaku penerima BLT tersebut merasakan manfaat dari menerima BLT yang diberikan kepada pelaku usaha. Karena dengan adanya BLT ini bisa dijadikan modal usaha yang dimiliki pada saat ini usahanya terbantu sehingga usaha yang ia jalankan pada masa pandemi bisa kembali membaik dari sebelum menerima BLT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian penerima BLT bagi pelaku UMKM mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah mekipun jumlah BLT sebenarnya tidak muncukupi untuk usaha saya ini tetapi saya dapat merasakan manfaat dari program ini salah satu manfaatnya yaitu dapat membantu penambahan modal usaha saya pada masa pandemi ini” (Wawancara dengan Bapak Rian pada tanggal 12 Maret 2022).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rian sebagai masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras bisa dilihat menurut Bapak Rian meskipun dengan jumlah BLT yang ia terima tidak mencukupi untuk membantu semua keperluan usaha yang ia miliki tetapi dengan BLT ini juga ia merasakan manfaatnya salah satu manfaat ia rasakan adalah dengan adanya BLT ini bisa membantu usaha Bapak Rian di Kecamatan Pangkalan Kuras dalam penambahan modal bagi usahanya yang dimiliki di masa pandemi yang terjadi pada saat ini.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Febri masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Program ini ada manfaatnya yang saya rasakan terutama dalam penambahan modal saya dimana sebelumnya usaha saya sempat terpuruk karena dampak Covid-19 dengan adanya BLT dari pemerintah dana BLT ini saya gunakan lagi untuk modal usaha saya saat ini”(Wawancara dengan Ibu Febri pada tanggal 12 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Febri masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT bagi pelaku UMKM ia sendiri merasakan manfaat program BLT yang dibuat oleh pemerintah pada masa pandemi. Karena dengan adanya BLT yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk para pelaku usaha memberikan manfaat bagi Ibu Febri selaku masyarakat yang menerima dan memiliki usaha pada masa pandemi dengan BLT yang diterima ia gunakan sebagai modal usaha yang dimiliki dimana usaha yang ia miliki sempat terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti pelaku UMKM yang menerima BLT pada masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Manfaat dari program BLT ini tentu sekali bisa saya rasakan karena pada masa pandemi ini usaha yang saya miliki sempat ada kendala dalam modal yang kurang karena pemasukan pada masa pandemi cukup minim dengan BLT ini saya bisa gunakan sebaikn mungkin dengan menjadikan modal usaha sehingga usaha saya terbantu” (Wawancara dengan Ibu Yanti pada tanggal 17 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti penerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras dari hasil wawancara ia merasakan manfaat dari program BLT yang disalurkan pada masa pandemi meskipun dengan jumlah BLT yang cukup minim bagi usaha yang ia miliki tetapi BLT tersebut dapat membantu dalam penambahan modal usahanya yang terdampak pandemi dimana sebelumnya pemasukan yang didapatkan di masa pandemi minim dari sebelumnya dan sempat kekurangan bagi usaha Ibu Yanti karena dengan adanya BLT ini usahanya terbantu dan bisa berjalan seperti yang diharapkan.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Abdullah masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT bagi pelaku UMKM, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya sangat merasakan manfaat dari program BLT ini karena usaha saya yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini bisa berjalan seperti semula sebelum pandemi” (Wawancara dengan Bapak Abdullah pada tanggal 23 Maret 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan

Pangkalan Kuras ia sendiri sangat merasakan manfaat dari program BLT ini. Karena dengan BLT ini juga memberi pengaruh yang baik bagi usaha yang ia miliki dengan memanfaatkan dana BLT yang diterima dari pemerintah sebagai penemabahan modal untuk membangkitkan usahanya sehingga usaha bapak Abdullah bisa berjalan dan mulai mebaik seperti semula sebelum pandemi Covid-19 sesuai yang diharapkn.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya sangat merasakan manfaatnya dari program BLT yang dibuat oleh pemerintah ini karena bisa membantu masyarakat yang memiliki usaha yang terdampak pandemi Covid-19 dalam penambahan modal pastinya ya bagi saya sendiri bisa membuka usaha baru dengan adanya BLT ini” (Wawancara dengan Ibu Dewi Saputri pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Saputri yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras ia merasakan manfaat dari program ini karena bisa membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi untuk menambah modal usaha yang masayrakat miliki agar tetap berjalan di masa pandemi serta yang Ibu Dewi Saputri rasakan sendiri itu adalah ia bisa menjadikan BLT tersebut sebagai modal untuk membuka usaha baru dengan BLT yang diterima di saat pandemi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Lilis masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras mengenai Kebermanfaatan

program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya sendiri sudah dapat merasakan manfaat dari program BLT ini contohnya saja dengan program BLT bisa membantu perekonomian saya di masa pandemi” (Wawancara dengan Ibu Lilis pada tanggal 10 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu bahwa ia sudah dapat merasakan manfaat dari program BLT ini dengan adanya BLT ini perekonomian ia terbantu pada masa pandemi saat ini. Karena pada masa pandemi begitu banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 terutama bagi masyarakat pelaku UMKM yang usahanya tidak begitu banyak mendapatkan pemasukan seperti sebelumnya bahkan para pelaku UMKM sempat kekurangan modal sehingga perekonomian masyarakat tidak membaik dengan BLT yang diterima masyarakat merasa terbantu di situasi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras yang menerima BLT bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut:

“Bagi saya yang menerimanya sangat bermanfaat karena bisa menambah modal yang saya butuhkan pada saat ini pandemi” (Wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 15 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras ia sebagai penerima BLT yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras sangat merasakan manfaat BLT ini. Karena dengan adanya BLT ini yang Pemerintah salurkan untuk pelaku usaha bagi masyarakat yang menerima BLT tersebut bisa digunakan untuk penambahan modal usaha di masa pandemi agar usah yang

terdampak pada saat pandemi bisa membaik dan bisa berjalan seperti semula dan dengan BLT ini juga bisa memulihkan perekonomian bagi masyarakat yang menerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu sebagai berikut:

“Iya saya merasakan manfaat yang baik dari program ini karena bisa membantu saya memulihkan perekonomian pada saat ini” (Wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati pada tanggal 16 April 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Mayka Lesmawati masyarakat penerima BLT di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Ibu Mayka merasakan manfaat dari program ini. Karena program ini memberikan manfaat yang cukup baik yang Ibu Mayka Lesmawati rasakan yaitu salah satu manfaatnya bisa digunakan untuk membantu pemulihan perekonomian bagi ia sendiri dan bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang terdampak pandemi covid-19 yang terjadi pada saat ini sehingga perekonomian masyarakat juga mulai membaik dari dampak BLT yang telah diberikan oleh pemerintah.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani masyarakat penerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Iya saya dapat merasakan manfaat dari program BLT ini selain sebagai modal usaha manfaat dari program blt ini juga dapat menjadikan modal untuk kelangsungan hidup masyarakat penerima BLT pada masa

pandemi” (Wawancara dengan Ibu Meri Gustiani pada tanggal 16 April 2022).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Meri Gustiani masyarakat penerima BLT pada masa pandemi mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Ibu Meri Gustiani sendiri dapat merasakan mafaat dari program BLT ini. Karena selain bisa dijadikan modal usaha atau penamabhan modal bagi masyarakt yang memiliki usaha di Kecamatan pangkalan Kuras BLT ini juga bisa dijadikan untuk modal kelangsungan hidup atau pemulihan ekonomi bagi masyarakat penerima BLT pada masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras dapat masyarakat rasakan terutama dalam penambahan modal usaha untuk membangkitnya usaha yang terdampakn pandemi Covid-19 serta dapat untuk memulihkan perekonomian bagi masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di nasa pandemi Covid-19 dengan membawa perubahan yang di rasakan bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai indikator perubahan nyata maka dapat disimpulkan bahwa pada sub indikator Kebermanfaatan program bagi penerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras cukup bermanfaat, karena masyarakat yang menerima BLT bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat

merasakan manfaat dari program BLT yang diterima yaitu digunakan untuk pemulihan ekonomi dan penambahan modal usaha bagi masyarakat yang menerima BLT dengan demikian BLT yang diberikan oleh pemerintah cukup membawa dampak dan perubahan nyata bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada saat ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, bahwa dapat dilihat bahwa kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM ini dalam melihat Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata dapat dikatakan Kurang Efektiv. Karena masih banyak masyarakat yang mendapatkan BLT tetapi tidak memiliki usaha dan terdapat masyarakat yang tidak mendaftarkan diri secara online justru mendapatkan BLT bagi pelaku UMKM yang disalurkan oleh pihak Pemerintah pada masa pandemi.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa BLT yang dibuat Pemerintah tersebut disalurkan untuk masyarakat pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19 bukan untuk masyarakat yang tidak memiliki dan tidak terdampak pandemi Covid-19. Jika dilihat dari tujuan program yang dibuat oleh Pemerintah yaitu untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat pelaku UMKM di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka terjadi ketidaksesuaian dari tujuan kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam bentuk kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 sehingga program ini masih dikatakan

program yang abal-abal yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat pelaku UMKM terutama yang ada di Desa dan Kecamatan. Agar para masyarakat pelaku usaha yang ada di Desa dan diKecamatan bisa memahami dan mengetahui mengenai kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM yang yang dibuat oleh Pemerintah dan disalurkan kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini.
2. Kepada pihak Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan secara efektif lagi dilapangan. Dengan demikian dilakukan secara efektif oleh Pemerintah kegiatan program BLT bagi pelaku UMKM, maka tujuan dan sasaran dari program ini memang tepat sesuai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya agar program BLT yang dibuat oleh Pemerintah tidak terjadinya penyimpangan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Kepada Pegawai Bank Bri dalam penyaluran hendaknya disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan BLT bagi pelaku UMKM di masa pandemi untuk kemajuan dan mem,bangkitkan usaha para masyarakat. Apabila BLT disalurkan kepada pihak masyarakat

yang membuthkan tentu sangat berguna, bermanfaat serta tujuan dari program yang dibuat oleh Pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4. Kepada seluruh masyarakat pelaku UMKM terutama di Kecamatan Pangkalan Kuras hendaknya mencari informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dengan mencari informasi maka masyarakat pelaku UMKM bisa mengetahui kegiatan atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah seperti Program BLT bagi pelaku UMKM yang dibuat pada masa pandemi yang berdampak kepada masyarakat yang memiliki usaha. Apabila masyarakat mengetahui informasi ini maka masyarakat yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 bisa terbantu dengan disalurkan BLT bagi pelaku UMKM pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABET cv.
- Andriani, R. (2018). Efektivitas Program Peningkat Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 4-5.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Daniarsyah, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Kusuka Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 8.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Handini, S., Sukei, & Kanty, H. (2019). *Manajemen UMKM Dan Koperasi*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Hasibuan, M. S. (2015). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Islamy, M. I. (2018). *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Karmanis, & Karjono. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.

- Lumempow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *JURNAL GOVERNANCE*, 3.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*, 4-6.
- Mendome, M., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *JPA*, 43.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Priyono. (2017). *Pengantar Manajemen*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Siagian, S. P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Streers, R. M. (2020). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sulastri, L. (2016). *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: LaGood's Publishing.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.

Zulkifli, & Yogya, M. A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Regulasi

PP Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah



LAMPIRAN

PENELITIAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau